

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di level teks dan level konteks pada bab sebelumnya, pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait penyosokan yang dilakukan Kedaulatan Rakyat terhadap George Aditjondro. Kesimpulan ini menjawab rumusan permasalahan yang terdapat pada bab I, yaitu bagaimana SKH Kedaulatan Rakyat menyosokkan George Aditjondro terkait kasus penghinaan terhadap Keraton Yogyakarta pada periode pemberitaan Desember 2011.

Setidaknya ada tiga buah penyosokan yang dibuat Kedaulatan Rakyat mengenai George Aditjondro yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil analisis, yaitu:

1. George Aditjondro diprofilkan atau disosokkan negatif karena berani mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pernyataannya yang berbunyi “Kraton Yogyakarta jangan disamakan dengan Kerajaan Inggris, Kraton Yogyakarta hanya sekedar Kraton, Kraton itu ya kera ditonton”, telah menimbulkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta. George pun langsung dilaporkan oleh perwakilan massa (Forum Masyarakat Yogyakarta) ke Polda DIY dan masyarakat pun mendatangi kediaman George untuk mengusirnya dari tanah Yogyakarta. Kasus ini mulai disorot Kedaulatan Rakyat pada tanggal 2 Desember 2011, dengan menurunkan artikel yang menjadi *headlines* dengan judul

“Aditjondro Menghina Keraton”. Kemudian berita *follow up* kasus ini pun diturunkan Kedaulatan Rakyat keesokan harinya, dengan judul “Tabur Bunga di Depan Rumah Aditjondro”. Pada artikel tersebut ditekankan alasan mengapa masyarakat begitu “murka” dengan pernyataan Aditjondro melalui pernyataan sebagai berikut.

Yang dikatakan sama saja menghina masyarakat Yogya secara keseluruhan dan khususnya Keraton Yogyakarta. Kraton Yogya punya pengaruh terhadap kehidupan di Yogya, sehingga sebagai warga Yogya seharusnya menghormati Keraton, bukan sebaliknya,” kata M.Suhud. (dikutip dari artikel berita “Tabur Bunga di Depan Rumah Aditjondro” pada SKH Kedaulatan Rakyat edisi 3 Desember 2011)

Kedaulatan Rakyat pun menunjukkan bahwa *plesetan* yang dikeluarkan George bukanlah perkara biasa, sebab tidak hanya menyinggung Keraton saja, namun sudah menyangkut harga diri masyarakat Yogyakarta.

2. George Aditjondro juga diprofilkan ke arah positif dari Kedaulatan Rakyat. Setelah masyarakat Yogyakarta melakukan aksi protes serta menuntut Aditjondro di ranah hukum, akhirnya Aditjondro keluar dari persembunyiannya dan muncul di hadapan publik. George Aditjondro pun menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada Keraton Yogyakarta. Terlebih sebelum Aditjondro berani muncul ke hadapan publik, Sultan sempat mengeluarkan komentar terkait kasus ini. Pada artikel pemberitaan “Sultan Belum Dihubungi Aditjondro” yang diterbitkan SKH Kedaulatan Rakyat pada tanggal 6 Desember 2011, dipaparkan keraguan Sri Sultan HB X terhadap niat sosok kontroversial (Aditjondro, *red*) untuk menyelesaikan masalah ini. Dapat dikatakan, posisi Aditjondro semakin tersudutkan dengan situasi yang semakin

memanas. Keluarnya George Aditjondro di hadapan publik untuk meminta maaf, serta mendatangi Kepatihan untuk menemui Sultan walaupun usahanya nihil. Apa yang dilakukan Aditjondro menunjukkan “sosok kontroversial” ini berusaha merealisasikan niatnya untuk bertanggung jawab atas pernyataan kontroversial yang dianggap telah menghina martabat Keraton Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat pun tidak melewatkan momentum tersebut begitu saja, artikel berita dengan judul “Aditjondro Minta Maaf Sultan” diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2011 dan menjadi *headlines*.

3. Masyarakat Yogyakarta yang sudah terlanjur sakit hati dengan pernyataan George, nyatanya tidak sepenuhnya menerima permintaan maaf George Aditjondro. Hal ini dibuktikan dengan sikap masyarakat yang tidak mencabut laporannya, malah semakin mendesak Polda DIY untuk segera menyelidiki kasus ini dan menangkap George Aditjondro. George pun kembali diprofilkan ke arah negatif. Permintaan maaf dari George dianggap tidak bisa meluluhkan sakit hati masyarakat Yogyakarta yang jengah dengan berbagai macam isu yang mengganggu stabilitas Keraton. Ada “harga” yang harus dibayar George Aditjondro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak bisa dianggap persoalan *sepele* belaka. Dalam hal ini, pertanggungjawaban yang dituntut oleh masyarakat Yogyakarta kepada Aditjondro, tidak hanya dalam bentuk moril saja tetapi juga dari aspek hukum yang diproses pihak kepolisian.

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan media cetak lokal tertua di Yogyakarta dan memiliki jumlah pembaca yang lebih tinggi dibanding media lokal lainnya. Dengan jumlah pembaca yang banyak, menunjukkan kepercayaan masyarakat Yogyakarta terhadap informasi yang disajikan media cetak ini. Pemberitaan mengenai kasus penghinaan yang dilakukan George Aditjondro dinilai sebagai berita yang memiliki kepentingan bagi publik, sebab pernyataan kontroversial George dinilai merendahkan martabat Keraton Yogyakarta. Terlebih, ucapan George telah memancing amarah dan aksi protes di tengah masyarakat Yogyakarta. Karena itulah, berita mengenai kasus penghinaan yang dilakukan George Aditjondro dinilai Kedaulatan Rakyat penting dan layak untuk diberitakan.

Peneliti melihat Kedaulatan Rakyat cenderung menyosokkan George Aditjondro ke arah yang negatif. Hal ini ditunjukkan dengan artikel berita yang didominasi dengan narasumber yang kontra dengan pernyataan George Aditjondro. Ketika peneliti mengkonfirmasi hal tersebut, redaksi Kedaulatan Rakyat memiliki alasan bahwa kesulitan mereka untuk menemui George Aditjondro menjadi penyebab ketiadaan keterangan George Aditjondro di beberapa artikel. Walaupun begitu, ketika George muncul di hadapan publik untuk meminta maaf, Kedaulatan Rakyat langsung menurunkan artikel berita yang isinya didominasi pernyataan yang bernada positif bagi George Aditjondro.

Dari proses wawancara, peneliti melihat SKH Kedaulatan Rakyat “berusaha” menunjukkan sikapnya yang tidak berpihak kepada siapapun, walaupun terdapat tarik menarik kepentingan di lingkungan medianya. SKH Kedaulatan Rakyat pun

menegaskan posisinya untuk menjadi suara aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik. Namun, media tetaplah media. Sudah bukan rahasia lagi, jika tidak ada media yang sepenuhnya netral. Layaknya sebuah media, tentu saja ada *frame* tertentu dari kebijakan redaksional dalam mengemas sebuah berita. Begitu pula dengan SKH Kedaulatan Rakyat dalam mengkonstruksi berita terkait kasus George Aditjondro. Dari hasil penelitian melalui analisis teks, peneliti menemukan ada *frame* tertentu yang dibentuk kebijakan redaksional SKH Kedaulatan Rakyat. Hal ini terlihat dari pemilihan fakta, pengisahan fakta, penyusunan fakta, pemilihan narasumber sampai penggunaan frase tertentu. Dari unsur-unsur tersebut kemudian membentuk arah wacana yang dipahami peneliti bahwa ada *frame* khusus yang ingin dibentuk.

Melaui analisis dengan menggunakan beberapa teori pada Bab I, salah satunya adalah “*Media Organizational Theory*” milik Denis Mc Quail, peneliti menemukan bahwa tidak semua agen-agen pengaruh yang dekat dengan inti organisasi media memiliki pengaruh secara langsung. Dalam hal ini, redaksi SKH Kedaulatan Rakyat memiliki “posisi tawar” atau bahkan bersikap keras untuk mempertahankan idealismenya. Hal ini pun terlihat di dalam hubungannya dengan pemilik media, pengiklan, pemerintah maupun masyarakat.

Dari hasil penelitian melalui analisis level teks dan level konteks yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan SKH Kedaulatan Rakyat cenderung menyosokkan George Aditjondro ke arah yang negatif dalam kasus penghinaan terhadap Keraton Yogyakarta.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum bisa mencapai kata “sempurna”, sebab terdapat kekurangan serta keterbatasan dalam proses penelitian. Menggunakan analisis *framing* dibutuhkan ketelitian serta ketajaman dalam menganalisis baik level teks dan konteks, tidak jarang peneliti pun mengalami kesulitan sebab ada banyak tahap yang harus dilewati untuk menyelesaikan penelitian ini. Pada proses wawancara, peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali data dari informan, namun pada kenyataannya kondisi informan pun mempengaruhi proses wawancara. Sehingga pada beberapa bagian, peneliti merasa belum mendapatkan data yang diinginkan untuk mendukung analisis terkait topik penelitian ini. Peneliti pun menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk tidak ragu mewawancarai beberapa informan lagi, demi memantapkan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian penyosokan George Aditjondro terkait kasus penghinaan terhadap Keraton Yogyakarta dengan perangkat *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, peneliti merasa model analisis tersebut sesuai untuk “membongkar” bagaimana konstruksi yang dibentuk Kedaulatan Rakyat atas realita yang terjadi. Sehingga peneliti pun dapat melihat arah kecenderungan wacana dari artikel pemberitaan yang dikemas media tersebut.

Peneliti melihat Kedaulatan Rakyat sudah melakukan fungsinya sebagai aspirasi suara masyarakat dan berusaha berimbang. Namun beberapa artikel di periode Desember 2011, seolah meniadakan pernyataan dari salah satu narasumber utama yaitu, George Aditjondro. Dari hasil wawancara, peneliti

melihat wartawan cenderung menyerah pada keadaan hilangnya Aditjondro dari hadapan publik. Sehingga kondisi tersebut menjadi pembelaan bagi wartawan. Peneliti berharap wartawan Kedaulatan Rakyat, tidak hanya bergantung pada satu narasumber utama. Namun bisa mencari narasumber lain yang dianggap “membela” sosok kontroversial yang tengah diberitakan, dalam hal ini misalnya Aditjondro. Selain itu, wartawan juga bisa mencari narasumber yang diindikasikan netral dalam memandang kasus kontroversial ini. Sebab keberadaan narasumber dapat menyeimbangkan arah wacana, sehingga aspek *cover both sides* dapat tercapai. Selain itu, ketika berkomitmen untuk tidak membuat pemberitaan yang frontal, maka aplikasikan juga dalam prakteknya. Sebab peneliti melihat, penulisan berita terkait topik penelitian, cenderung menuliskan kutipan pernyataan-pernyataan narasumber yang cenderung “mengandung” kontroversi.

Berdasarkan perjalanan penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih “berani” di dalam mengeksplorasi jawaban dari informan. Di samping itu, walaupun metode analisis *framing* Zongdhang Pan dan Gerald M.Kosicki “cocok” untuk membongkar konstruksi realita dari sebuah surat kabar, namun peneliti juga harus bisa melihat bagaimana model pengemasan beritanya. Sebab ada metode analisis *framing* lain yang memungkinkan untuk menganalisis teks berita ber-*genre* surat kabar harian.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, JB. 2005. *Seteguh Hati Sekokoh Nurani*. Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Indonesia)*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik)*. Jakarta: Granit.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mc Quail, Denis. 1992. *Media Performance – Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publication.
- Sasangka, Danarka. 2011. “*Coding Sheet Analisis Pan dan Kosicki*” (Analisis Isi dan Framing, Semester Genap). Yogyakarta: UAJY.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sobur, Alex. 2004. *Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL ILMIAH

- Scheufele, Dietram A. 1999. *Framing as a Theory of Media Effects*. Journal of Communication. Winter.

SUMBER SURAT KABAR

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 2 Desember 2011 dalam artikel “Aditjondro Menghina Keraton”.

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 3 Desember 2011 dalam artikel “Aditjondro Menghina Keraton”.

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 5 Desember 2011 dalam kolom Opini oleh Sudomo Sunaryo “Aditjondro Menghina Keraton”.

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 6 Desember 2011 dalam artikel “Sultan Belum Dihubungi Aditjondro”.

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 8 Desember 2011 dalam artikel “Aditjondro Minta Maaf Sultan”.

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 9 Desember 2011 dalam artikel “Desak Polda Periksa Aditjondro”.

SUMBER INTERNET

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/01/lvitrn-sebut-keraton-yogya-kera-sri-sultan-minta-george-adojtjondro-jaga-mulut> Diakses pada tanggal 6 Mei 2012, pukul 11:25 WIB.

<http://profil.merdeka.com/indonesia/g/george-junus-aditjondro/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2012, pukul 14:00 WIB.

<http://id.shvoong.com/books/1873152-harian-kedaulatan-rakyat/#ixzz22qHZdaFa> Diakses pada 2 Agustus 2012, pukul 12:15 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/01/lvitrn-sebut-keraton-yogya-kera-sri-sultan-minta-george-adojtjondro-jaga-mulut> Diakses pada tanggal 28 Mei 2012, pukul 16:40 WIB.

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/448251/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2012, pukul 09:11 WIB.

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=29330> Diakses pada tanggal 10 Juli 2012, pukul 13:31 WIB.

SKRIPSI

Ratih, Felicia. *Profiling* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia (Analisis *Framing* Pencitraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia edisi 1 Desember 2009 – 24 Februari 2010 Terkait dengan Kasus Bank Century). UAJY. Skripsi.

Purnamasari, Novita Ika. Penyosokan PSSI Terkait Liga Piala AFF Suzuki Cup 2010 dalam Majalah Tempo (Analisis *Framing* Penyosokan PSSI dalam Majalah Tempo Edisi 3- 9 Januari 2011). UAJY. Skripsi.


Analisis Teks Berita 1

-Judul : Aditjondro Menghina Keraton

-Edisi : 2 Desember 2011

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>-Obyek Wacana: George Aditjondro mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menghina Keraton Yogyakarta. Pernyataannya menuai aksi protes dari masyarakat Yogyakarta, salah satunya Forum Masyarakat Yogyakarta yang melaporkan George ke Polda DIY.</p> <p>-Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Aditjondro Pihak yang telah melakukan penghinaan melalui pernyataan kontroversialnya. • Keraton Yogyakarta Institusi atau lembaga budaya yang memiliki tatanan tertinggi di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan kerajaan yang menjadi sorotan atas 	<p>Jenis Wacana -Dilantunkan oleh Wartawan</p> <p>1. (pada <i>lead</i> berita).....George Junus dilaporkan belasan orang yang tergabung dalam FMY.....ke Mapolda DIY. Massa yang datang mengenakan pakaian adat Jawa.....</p> <p>FUNGSI: Dari <i>lead</i> yang dibuat oleh wartawan, menunjukkan bahwa pernyataan George Aditjondro tentang Keraton menimbulkan reaksi kontra terkait pernyataannya tersebut. Dibuktikan dengan adanya pelaporan ke pihak kepolisian. Wartawan pun member penekanan bahwa yang membuat laporan adalah sekelompok masyarakat yang menjunjung tinggi kebudayaan atau <i>unggah ungguh</i> di Yogyakarta. Hal ini digambarkan dengan</p>	<p>-Placement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ini berada pada halaman pertama di Kedaulatan Rakyat edisi 2 Desember 2011 dan menjadi <i>headline</i> dengan judul yang mencolok. • Judul: Aditjondro Menghina Keraton (sub judul: Dilaporkan ke Polda DIY, Didesak Minta Maaf), menggambarkan George yang telah menghina Keraton Yogyakarta melalui pernyataan kontroversial yang ia keluarkan. Dan pernyataan tersebut telah menuai kontra dari sejumlah pihak. • Penyosokan George tersebar dari awal hingga akhir artikel berita. Dalam artikel ini lebih banyak menonjolkan penggambaran George dari pemaparan oleh pihak lain. 	<p>-Metaphors</p> <ul style="list-style-type: none"> • “pencemaran nama baik” Kalimat yang terdapat pada <i>lead</i> berita mengarah pada situasi dimana nama baik yang dimiliki Keraton Yogyakarta menjadi ternoda oleh sebuah pernyataan dari George. • “menista” (pada paragraf 3) Kata tersebut berasal dari kata nista, yang berarti hina, noda, cela. Hal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan George telah menghina status Keraton Yogyakarta. • “menguri-uri” <i>Menguri-uri</i> diambil dari bahasa Jawa, yang berarti melestarikan. Kata tersebut terdapat dalam paragraf 3 yang menekankan para pelapor atau masyarakat Yogya adalah mereka yang peduli untuk

<p>pernyataan George yang konteksnya diindikasikan mengandung penghinaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMY (Forum Masyarakat Yogyakarta) Merupakan organisasi atau kelompok yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan bertujuan untuk membela Keraton Yogyakarta. • Kapolda DIY, Brigjen Pol Tjuk Basuki Pemimpin kepolisian daerah Yogyakarta yang menemui langsung masyarakat yang mendesak Kapolda untuk menangani kasus penghinaan yang dilakukan George. <p>-Pelantun Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan Pihak yang mengemas dan mengisahkan fakta dalam bentuk pemberitaan yang membentuk suatu konstruksi terkait kasus penghinaan yang dilakukan George Aditjondro. • Ki Demang Wangsyafudin Perwakilan dari FMY yang 	<p>sekelompok orang yang memakai baju adat Jawa.</p> <p>2.”Keraton Yogyakarta jangan disamakan dengan kerajaan Inggris, Kraton hanya sekedar Kraton, yaitu kera yang ditonton” (par. 2) FUNGSI: Setelah <i>lead</i>, paragraf kedua menjadi lanjutan penjelasan terkait apa yang dipermasalahkan masyarakat Yogyakarta yang diwakili FMY. Adanya kutipan tersebut memaparkan sebab-akibat, yaitu pernyataan George yang dianggap telah menghina martabat Keraton Yogyakarta.</p> <p>3. Paragraf 3 menunjukkan kronologi kejadian. Dimana pernyataan kontroversial George keluar saat sedang memberikan diskusi. FUNGSI: Wartawan Kedaulatan Rakyat hanya menunjukan inti dari kronologi kejadian, tanpa adanya penjelasan mengapa pernyataan tersebut bisa keluar. Dalam hal ini, KR langsung fokus terhadap pernyataan kontroversial George saja. Adanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dari <i>lead</i> berita hingga paragraf lima membahas mengenai protes dan pelaporan yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta. Sedikit dijelaskan tentang kronologi kejadian, tetapi tidak terlalu spesifik dan hanya gambaran besarnya saja. • Paragraf enam dan tujuh berisi tentang bagaimana tanggapan Sultan HB X tentang adanya kasus tersebut. Disini Sultan terlihat tidak mau terlalu terburu-buru berkomentar dan tidak langsung memberikan aksi kontra terkait pernyataan George. 	<p>melestarikan budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “melukai perasaan” Kalimat ini mengacu pada kondisi perasaan masyarakat Yogyakarta yang telah disakiti oleh pernyataan kontroversial George. • “ penumpang gelap” Penggunaan istilah tersebut dalam paragraf 5, mengacu pada adanya dugaan bahwa pernyataan yang dikeluarkan George bukan murni berasal dari dirinya. Namun, ada pihak lain yang mempengaruhinya dan memiliki kepentingan tertentu. • “nabok nyilih tangan” Merupakan perumpamaan dalam bahasa Jawa, yang memiliki arti hendak menyalahkan atau mencelakakan orang lain namun melalui orang lain dan tidak langsung dari dirinya. <p>-Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Aditjondro • Pernyataan kontroversial yang menghina Keraton
---	--	---	--

<p>memberikan penjelasan atas protes keras yang dilayangkan masyarakat atas pernyataan George.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebagai raja dari Keraton Yogyakarta, beliau menjadi sorotan utama terkait dengan pernyataan kontroversial dari George Aditjondro yang diindikasikan menghina Keraton Yogyakarta. 	<p>pernyataan Ki Demang yang menutup paragraf ketiga menekankan bagaimana pernyataan tersebut dirasa sangat menghina dan melecehkan kebudayaan Kraton Yogyakarta. Walaupun hanya diwakili beberapa elemen masyarakat, namun pernyataan George seolah telah menyakiti seluruh masyarakat Yogyakarta.</p> <p>4. (par. 4).....pernyataan tersebut sangat melukai warga Jogja dan sangat tidak pantas diucapkan di depan publik..... sebagai warga yang tinggal dan bekerja di Yogya terlapor dinilai tidak mempunyai rasa terima kasih dengan segala fasilitas publik dan situasi sosial.....</p> <p>FUNGSI: Arah wacana ini semakin mengaskan bahwa masyarakat Yogya merasa pernyataan George sangat tidak pantas. Pada titik ini George dianggap semakin tidak tahu diri dan berterima kasih atas segala kenyamanan yang diterimanya baik dari lingkungan atau</p>		<p>Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Sultan HB X Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) <p>-Catchprases</p> <ul style="list-style-type: none"> “Makanya jadi orang tua itu bicaranya baik. Masak orang tua tidak bisa diteladani mulutnya” Pernyataan yang dikeluarkan Sri Sultan HB X seolah menggambarkan bahwa pernyataan yang dikeluarkan George memang tidak pantas diucapkan. Terlebih dengan usianya yang lebih dari setengah abad, George sepatutnya menjadi orang tua yang dapat diteladani perkataannya. Tanggapan yang dikeluarkan Sultan, juga merupakan bentuk slogan normatif, dimana etika masih dijunjung tinggi. <p>-Visual images Terdapat dua <i>Visual images</i> yang digunakan dalam artikel ini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Foto massa dari Forum Masyarakat Yogya yang melaporkan George
---	---	---	--

penerimaan publik selama ia tinggal di Yogyakarta. Hal ini tentu saja semakin memperburuk citra George, terlebih masyarakat belum melupakan kasus buku gurita cikeas yang ia terbitkan. Masyarakat seolah memberikan label sosok kontroversial terhadap penulis dan pengajar tersebut.

5. (pada par. 5).....FMY membawa poster bertuliskan *George siapa yang bayar kamu, hati-hati ada penumpang gelap disusupkan perguruan tinggi dan beraninya nabok nyilih tangan.....*

FUNGSI:

Melalui tulisan dari poster yang dikutip oleh wartawan ke dalam artikel ini, menunjukkan adanya dugaan bahwa George bukan aktor tunggal terkait dengan pernyataan kontroversial yang ia keluarkan. Seolah ada pihak lain yang menjadi *backing* bagi *George* untuk melakukan penghinaan terhadap kebudayaan Keraton. Sampai pada tahap ini, masih belum

Aditjondro dengan memakai baju adat jawa dan membawa poster yang mengecam pernyataan George.

- Gambar George Aditjondro yang sedang memegang *michrophone*. Di dalam gambar tersebut, dituliskan gambaran kronologi kejadian serta pernyataan kontroversial yang diucapkannya.



FUNGSI: Adanya kutipan pernyataan dari Sultan yang ditempatkan di akhir berita semakin memperburuk citra George. Terlebih komentar tersebut berasal dari seorang Raja yang memimpin Keraton Yogyakarta. Dengan adanya pernyataan tersebut seolah menegaskan bahwa George telah berperilaku yang tidak sesuai dengan posisinya sebagai orang tua yang seharusnya dapat menjadi teladan.

**Pelantun Wacana:
Ki Demang**

1. (pada par. 3) “Pernyataan tersebut menurut kami sangat menista, menghina dan melecehkan institusi kebudayaan Kraton Yogyakarta. Kami selaku masyarakat yang mengurungi budaya sangat tersinggung dengan ucapan tersebut”

FUNGSI:

Penekanan pada pernyataan tersebut yaitu adanya hubungan sebab akibat terkait pernyataan Aditjondro. Ki

Demang sebagai perwakilan FMY, menegaskan tidak ada yang bisa semena-mena mengeluarkan pernyataan yang menghina Keraton. Sebagai perwakilan masyarakat Yogyakarta, mereka sangat terhina, sebab selama ini merek selalu *menguri-uri* (melestarikan) budaya Keraton Yogyakarta yang kaitannya erat dengan kehidupan masyarakat.

2. “Kami juga meminta George Aditjondro untuk membuat permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat DIY melalui media massa maksimal 2 hari mendatang”

FUNGSI: Adanya pemaparan terhadap pernyataan tersebut semakin memperkuat arah wacana bahwa masyarakat menanggapi pernyataan George Aditjondro secara serius dan menuntut adanya permintaan maaf sesuai dengan keinginan mereka.

Pelantun Wacana:

Sri Sultan HB X

1. (pada par. 7) “Ya sudah tidak

apa-apa lah.. Makanya jadi orang tua itu bicaranya yang baik. Masak jadi orang tua tidak bisa diteladani mulutnya Untuk apa saya menanggapi itu”

FUNGSI: Mengutip sepenggal komentar Sultan, KR memberi kesan sosok Sultan HB X yang sabar dan tidak terburu-buru dalam menanggapi kasus penghinaan tersebut. Walaupun masyarakat Yogyakarta sudah cukup kebakaran jenggot akibat munculnya pernyataan kontroversial George. Tetapi Sultan HB X sebagai Raja Keraton, belum mau terlalu serius menanggapi pernyataan tersebut. Beliau lebih memilih memberikan tanggapan secara umum terkait perilaku George yang tidak sesuai dengan usianya saja.

Analisis Teks 2

-Judul : Tabur Bunga di Depan Rumah Aditjondro

-Edisi : 3 Desember 2011

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>-Obyek Wacana Aksi protes yang dilakukan berbagai elemen masyarakat kepada George Aditjondro</p> <p>FUNGSI: Adanya wacana ini untuk memberi informasi kepada khalayak bahwa pernyataan kontroversial yang dikeluarkan George Aditjondro berdampak negatif dan menuai kontra. Terbukti dengan adanya pelaporan kepada Polda DIY, penaburan bunga di kediamannya serta adanya sekelompok advokat yang menyomasi George. Dengan adanya wacana ini cenderung menyosokan George Aditjondro ke arah negatif.</p> <p>-Pelibat Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) Merupakan kelompok 	<p>Jenis Wacana -Pelantun Wacana: Wartawan</p> <p>1. (pada par.1) Sekitar 50 orang dari berbagai elemen masyarakat..... mendatangi rumah yang dikontrak George Junus..... (pada par. 2) Mereka meminta penulis ini meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait ucapannya yang mengatakan bahwa “Kraton Yogyakarta jangan disamakan dengan Kerajaan Inggris, Kraton Yogyakarta itu ya kera ditonton”.</p> <p>FUNGSI: Kedua paragraf menunjukkan bagaimana aksi protes “tabur bunga” yang dilakukan FMY di kediaman George Aditjondro, setelah melaporkan penulis tersebut terkait dengan kasus penghinaan yang dilakukannya. Di paragraf kedua pun kembali</p>	<p>Placement</p> <ul style="list-style-type: none"> Artikel ini berada pada halaman pertama di Kedaulatan Rakyat edisi 3 Desember. Artikel tidak menjadi <i>headline</i> dan posisinya ditempatkan di akhir bagian halaman pertama. Judul: “Tabur Bunga di depan Rumah George Aditjondro” (sub judul: 50 Advokat Layangkan Somasi). FUNGSI: Pemilihan judul ini menggambarkan kelanjutan dari aksi protes yang dilakukan FMY. Setelah adanya pelaporan terhadap pernyataan George, mereka menunjukkan ketidaksukaannya dengan melakukan aksi tabur bunga. Selain itu, adanya tambahan sub judul mengenai sejumlah Advokat yang turut melayangkan somasi, juga memperkuat bentuk keseriusan 	<p>-Metaphors</p> <ul style="list-style-type: none"> “tabur bunga” Tabur bunga dapat diartikan sebagai bentuk kedukaan yang mendalam. Penggunaan kalimat tersebut dalam paragraf 1, memang menunjukkan makna yang sebenarnya. Namun, juga dapat menggambarkan kesedihan perasaan masyarakat Yogyakarta atas pernyataan yang diucapkan George Aditjondro. “layangkan” Sama artinya dengan mengarahkan atau mengirimkan. Dalam hal ini, merujuk pada konteks mengarahkan somasi kepada George Aditjondro dari sekumpulan Advokat.

<p>masyarakat yang berada pada garda terdepan untuk memprotes penghinaan yang dilakukan George. Di sebagian artikel dituliskan bentuk protes yang dilakukan FMY.</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Junus Aditjondro Aktor tunggal yang dianggap harus bertanggung jawab atas pernyataannya yang telah menghina Keraton dan masyarakat Yogyakarta. Dalam wacana ini, George masih belum memberikan pembelaan atau penjelasan terkait kasus yang menyimpannya. <p>-Pelantun Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan Dalam wacana ini, wartawan menjadi pengemas dan penyampai informasi kepada masyarakat luas terkait dengan kejadian aksi tabur bunga di kediaman George Aditjondro. • M.Suhud Merupakan Koordinator massa FMY yang melakukan 	<p>dituliskan apa bunyi pernyataan kontroversial yang diucapkan George Aditjondro pada saat menjadi pembicara. Kedaulatan Rakyat seolah ingin mengingatkan kembali tentang pernyataan George kepada khalayak.</p> <p>2.(pada par. 3) Saat massa datang, George Junus dan keluarganya tidak ada di rumah..... Massa juga menyerahkan tiket bus dengan tujuan Yogya-Semarang.....</p> <p>FUNGSI: Kedaulatan Rakyat hendak menunjukkan melalui situasi yang dipaparkan dalam wacana ini, dimana George sepertinya sudah sadar bahwa keberadaannya di Yogya sedang tidak aman, karena bisa menjadi sasaran amuk massa akibat pernyataan kontroversialnya. Adanya ketidaksukaan masyarakat terhadap keberadaan George, terbukti dengan dilakukannya aksi tabur bunga serta pemberian tiket bus yang menjadi symbol untuk mengusir George dari tanah Yogyakarta.</p> <p>3.(pada par.6) Terkait laporan FMY terhadap George, Polda DIY sudah menindaklanjutinya</p>	<p>pihak lain selain FMY untuk memperkarakan kasus George Aditjondro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyosokan George tersebar dari awal hingga akhir artikel berita. Dalam artikel ini lebih banyak menonjolkan ketidaksukaan serta protes yang terhadap pernyataan yang dikeluarkan George. • <i>Lead</i> berita hingga paragraf empat menunjukkan situasi aksi tabur bunga di rumah Aditjondro yang menunjukkan amarah sekelompok masyarakat atas kasus penghinaan Keraton. • Penegasan ketidaksukaan dan protes masyarakat semakin ditunjukkan di paragraf empat dimana terdapat betapa kuatnya pengaruh keberadaan Keraton Yogyakarta terhadap kehidupan masyarakat, sehingga mereka tidak rela ada pihak yang berani menghina dan merendahkan Keraton Yogyakarta. • Kasus penghinaan ini pun semakin ditanggapi serius dari berbagai pihak. Kepolisian 	<ul style="list-style-type: none"> • “meminta maaf secara terbuka” Kalimat yang berada pada paragraf 2, mengarah pada tuntutan FMY kepada Aditjondro untuk mengeluarkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Yogyakarta dan tidak hanya kepada satu pihak saja. Dan juga permintaan maaf tersebut tidak boleh melalui perantara, namun keluar dari mulut George sendiri dan disaksikan oleh masyarakat. • “orasi” (pada paragraf 3) Penggunaan kata ini menunjukkan adanya pidato yang dipimpin oleh perwakilan FMY dalam menyuarakan aspirasi masyarakat atas ketidaksukaan terhadap pernyataan George Aditjondro. • “kecaman” Menurut KBBI, ke-cam-an berarti teguran yang keras, kritikan; celaan. Penggunaan kata tersebut dalam paragraf 3, menunjukkan adanya teguran keras yang dikeluarkan FMY melalui media poster yang ditempel di rumah George saat
---	---	---	---

<p>aksi protes dengan melakukan aksi tabur bunga. FMY adalah forum yang terdiri dari kumpulan berbagai elemen masyarakat yang mengaku membela dan menjunjung tinggi kebudayaan Keraton Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hj Anny Pudjiastuti (Kabid Humas Polda DIY) Dalam wacana ini, Humas Polda yaitu Hj Anny Pudjiastuti menyampaikan tindak lanjut dari laporan yang diadakan FMY. Melalui artikel ini pun diinformasikan penanganan kasus yang dilakukan Polda DIY pun masih pada tahap pemanggilan pihak-pihak yang terkait. • M.Syafei, SH. (Koordinator Advokat Pembela Kehormatan Yogyakarta (APKY)) Dalam wacana ini, M.Syafei merupakan perwakilan dari APKY yang memberikan pernyataan tentang protes dan aksi dari APKY. APKY 	<p>dan telah membuat berita acara pemeriksaan..... FUNGSI: Dengan adanya pemaparan fakta ini, KR seolah memperjelas bahwa laporan terkait dengan pernyataan George tidak dianggap main-main. Dan itu artinya pertanda buruk bagi citra George, sebab ia akan berurusan dengan penegakan hukum. Selain itu, dengan kasus yang diperkarakan ke pihak kepolisian menunjukkan kasus George berdampak serius.</p> <p>Pelantun Wacana: M.Suhud (Koordinator FMY) 1.(pada par. 4)”Kraton Yogya punya pengaruh terhadap kehidupan di Yogya sehingga sebagai warga Yogya seharusnya menghormati Kraton, bukan sebaliknya”..... FUNGSI: Pernyataan yang dikeluarkan George tidak bisa dianggap sebagai suatu plesetan yang bisa dilupakan dan dimaafkan, sebab pernyataannya yang bernada negatif berkaitan erat dengan Keraton Yogyakarta. Melalui pernyataan tersebut, M.Suhud sebagai</p>	<p>daerah sudah memproses laporan dari FMY. Selain itu, tidak hanya sekelompok masyarakat saja yang melaporkan George, namun kumpulan advokat yang tentu saja paham akan ranah hukum pun turut menyomasi George terkait pernyataannya yang diindikasikan telah mengina Keraton Yogyakarta. Hal ini dipaparkan di pertengahan hingga akhir artikel berita. Penempatan tulisan tentang situasi tersebut semakin menegaskan bahwa kasus yang dialami George Aditjondro bukan perkara mudah yang bisa segera dimaafkan atau terselesaikan. Banyak proses yang harus dilewati George, terutama dalam ranah hukum, jika ingin kehidupannya kembali normal.</p>	<p>melakukan aksi tabur bunga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “menyomasi” Istilah dalam dunia hukum, dimana pelapor meminta terlapor untuk membayar sejumlah denda (hukum pidana) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perkara yang dilakukannya. • “langkah hukum” (paragraf 8) Mengacu pada tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam hal ini menyangkut proses hukum yang dilakukan FMY untuk melapor George secara pidana dan melakukan somasi. <p>-Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Aditjondro • FMY • Aksi Tabur Bunga oleh FMY • Polda DIY • Advokat Pembela Kehormatan Yogyakarta (APKY) • Pelaporan dan somasi kepada George Aditjondro
--	---	--	--

<p>terdiri dari 50 advokat Yogya yang bertujuan untuk membela kehormatan dan telah mengajukan somasi terkait pernyataan kontroversial yang dikeluarkan George Aditjondro.</p>	<p>perwakilan masyarakat Yogyakarta, menegaskan bahwa sudah sepantasnya masyarakat termasuk George menghormati Keraton bukan malah membuat plesetan yang bernada menghina.</p> <p>Pelantun Wacana: Hj Anny Pudjiastuti (Kabid Humas Polda DIY)</p> <p>1. (pada par. 5).....pihak-pihak yang terkait akan segera dimintai keterangan. “Terlapor juga akan kami panggil untuk dimintai keterangan.....” jelasnya.</p> <p>FUNGSI: Adanya pemaparan terhadap pernyataan ini setidaknya menjadi jawaban bagi kelanjutan penanganan kasus Aditjondro yang dilaporkan FMY. Dalam hal ini, kepolisian daerah menyosokan pihaknya sebagai aparat yang melakukan tugasnya sesuai prosedur dan menangani kasus dengan serius.</p> <p>Pelantun Wacana: M.Syafei, SH. (Koordinator Advokat Pembela Kehormatan Yogyakarta (APKY))</p>	<p>-Catchprasses “Kraton punya pengaruh terhadap kehidupan Yogya sehingga sebagai warga Yogya seharusnya menghormati Kraton, bukan sebaliknya” Pernyataan yang dilontarkan perwakilan massa dari FMY ini merupakan wujud loyalitas yang mereka miliki kepada Yogyakarta. Selain itu, hal ini menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban serta kesadaran masyarakat Yogyakarta untuk menghargai Keraton. Sebab bila dirunut dari sejarah dan apa yang dirasakan masyarakat, Keraton memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Yogyakarta.</p> <p>-Depiction “Keraton identik dengan Yogya sebagai kota budaya Jawa” Menjadi gambaran akan situasi dan kondisi diYogyakarta, bahwa Keraton Yogyakarta merupakan satu kesatuan dengan masyarakat di provinsi D.I Yogyakarta. Sehingga apapun yang menimpa Keraton terlebih hal-hal yang tidak</p>
---	--	--

1. (pada par. 7) "Perkataan George tak hanya menghina Kraton, tapi juga rakyat Yogya..... kami melakukan langkah hukum dengan melaporkannya secara pidana dan melakukan somasi sebagai langkah perdata," tegasnya.

FUNGSI: Arah wacana ini melanjutkan bentuk protes dan pelaporan yang dilakukan sekelompok elemen masyarakat. Tidak mau ketinggalan, para praktisi hukum (APKY) turut memperkarakan kasus penghinaan yang dilakukan Aditjondro. Terlebih mereka menganggap pernyataan George Aditjondro melanggar hukum pidana. Aksi para praktisi hukum ini dilatarbelakangi oleh tujuan mereka yang ingin menjaga kehormatan Yogyakarta dari segi ranah hukum.

sesuai dengan *unggah ungguh* (tata karma), tidak hanya akan menjadi permasalahan Keraton saja, namun masyarakat akan turut serta untuk mengatasi permasalahan tersebut. dalam hal ini tentu saja terkait dengan pernyataan kontroversial George yang telah menghina martabat Keraton Yogyakarta.

-Visual Image
Visual image yang digunakan dalam artikel ini adalah foto anggota FMY yang melakukan aksi tabur bunga di kediaman George Aditjondro.

Analisis teks 3

-Judul : Sultan Belum Dihubungi Aditjondro

-Edisi : 6 Desember 2011

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>-Obyek Wacana Tanggapan Sultan Hamengku Buwono X tentang pernyataan George Aditjondro yang diindikasikan telah menghina Keraton Yogyakarta.</p> <p>FUNGSI: Wacana ini memberikan informasi tentang kelanjutan dari kasus George Aditjondro. Jika pada artikel berita di beberapa hari sebelumnya, Kedaulatan Rakyat memaparkan aksi protes serta kelanjutan dari penyelidikan kepolisian terhadap kasus penghinaan ini, maka pada wacana ini dipaparkan tanggapan Sultan HB X terhadap niatan minta maaf dari George yang menurutnya tidak direalisasikan dan hanya sekedar niat semata.</p>	<p>Jenis Wacana -Pelantun Wacana: Wartawan 1.(pada par.1) Sri Sultan HB X belum bersedia memberikan komentar terkait pernyataan George.....Sebab hingga kemarin Raja Keraton Yogya mengaku belum dihubungi..... (pada par. 2) “Saya belum dihubungi kok. Ya nanti kita lihat dulu,” kata Sultan menjawab pertanyaan KR.....akan dilaksanakan. FUNGSI: Di dalam paragraf 1 dan 2 menunjukkan. Sultan sebagai pihak yang sepatutnya dicari George Aditjondro untuk meminta maaf, tidak merasa sudah dihubungi George. Dituliskannya pernyataan Sultan HB X pun semakin menguatkan bahwa Sultan enggan untuk berkomentar lebih</p>	<p>Placement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ini berada pada halaman pertama di Kedaulatan Rakyat edisi 6 Desember 2011. Artikel tidak menjadi <i>headline</i> dan posisinya ditempatkan di tengah halaman. • Judul: “Sultan Belum Dihubungi Aditjondro” (sub judul: Permintaan Maaf Tak Menghapus Pidana). FUNGSI: Pemilihan judul ini menunjukkan adanya ketimpangan fakta. Sebelumnya George mengaku telah mencoba menghubungi Sultan, namun Sultan kini mengakui ia merasa belum dihubungi George. Hal ini semakin menggambarkan niatan permintaan maaf George seolah hanya diucapkan semata. Adanya penambahan sub judul juga semakin mempertegas bahwa jika George meminta 	<p>-Metaphors</p> <ul style="list-style-type: none"> • “menghapus” Terdapat dalam sub judul, dimana konteksnya mengarah untuk menghapus atau menghilangkan sesuatu. Dalam hal ini, permintaan maaf dari George Aditjondro tidak akan menghilangkan proses hukum yang tengah berlangsung. • “pencemaran” Dalam paragraf 5, penggunaan kata pencemaran ini menjadi alasan kasus George diperkarakan ke Kepolisian Daerah Yogyakarta. Hal ini dikarenakan George telah menodai nama baik Keraton Yogyakarta. • “bukan kerabat keraton” Penggunaan kalimat tersebut pada paragraf 7 menunjukkan

<p>-Pelibat Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Aditjondro Dalam wacana ini George yang telah melakukan penghinaan, dianggap niatannya untuk minta maaf hanya sekedar niat. Sebab Sultan HB X sendiri menyatakan, dirinya belum ditemui George secara langsung. • Masyarakat Yogyakarta Selain Keraton, masyarakat Yogyakarta merupakan pihak yang paling kebakaran jenggot terkait pernyataan George. Diwakili oleh FMY, mereka pun melakukan aksi protes serta melaporkan George ke pihak kepolisian daerah. <p>-Pelantun Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan Memiliki peranan yang besar dalam membuat dan menyajikan informasi terkait Dalam wacana ini, wartawan cenderung melihat kasus ini dari sudut pandang Sri Sultan HB X. 	<p>jauh jika pihak yang bermasalah (George) belum bertemu dengannya. George pun disosokan sebagai seseorang yang hanya memiliki niat tapi tak memiliki aksi.</p> <p>2.(pada par.4) Sementara praktisi hukum Achiel Susanto mengatakan, permintaan maaf hanya sebagai salah satu bentuk mengurangi aspek pidana namun tidak menghapus</p> <p>.....jika unsur pidananya terpenuhi, harus tetap diproses oleh penyelidik</p> <p>FUNGSI: Melanjutkan tanggapan dari Sri Sultan yang tidak mau berkomentar banyak tentang niat George untuk minta maaf. Pemaparan dari praktisi hukum ini seolah meyakinkan publik bahwa kasus George sudah masuk ke ranah hukum, yang berarti bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Sehingga niat George untuk minta maaf pun tidak akan terlalu mengubah takdirnya untuk tetap berhadapan dengan hukum.</p> <p>3. (pada par.8)yang perlu</p>	<p>maaf pun kasus yang tengah di proses oleh pihak kepolisian daerah tetap berjalan. Pemilihan judul dan sub judul dalam wacana ini saling menguatkan konstruksi yang diarahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyosokan George Adijtondro dalam artikel ini pun bernada negatif dan tersebar dari awal artikel hingga akhir. Terlebih isi keseluruhan artikel ini menanggapi niat permintaan maaf George dari sudut pandang Sultan HB X dan praktisi hukum. • Dari paragraf pertama hingga ketiga memaparkan tanggapan dan sikap Sultan HB X ketika ia mendengar adanya niatan George Adijtondro untuk meminta maaf. Dalam artikel ini Sultan menjadi aktor utama yang memiliki pengaruh besar untuk menentukan kelanjutan kasus penghinaan yang dilakukan Aditjondro. • Pemikiran dari praktisi hukum yaitu Achiel Suyanto, dituliskan dalam porsi yang cukup dominan (Paragraf 4 hingga 	<p>bahwa masyarakat Yogya yang melaporkan George yang telah menghina Keraton, memang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Keraton Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “notabene” Merupakan bentuk penegasan atas suatu pernyataan atau fakta tertentu. Penggunaan “notabene” juga sebagai tanda untuk memperhatikan suatu pernyataan atau realita yang diangkat. • “nguri-uri” <i>Menguri-uri</i> diambil dari bahasa Jawa, yang berarti melestarikan. Kata tersebut terdapat dalam paragraf 7 yang menekankan masyarakat Yogya pantas untuk tersinggung atas pernyataan George, sebab selama ini mereka yang peduli untuk melestarikan budaya Jawa. • “motif” Penggunaan “motif” pada paragraf 8 hendak mengacu adanya alasan yang
---	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Sri Sultan Hamengku Buwono X Raja Keraton Yogyakarta ini memiliki porsi pernyataan yang besar dalam artikel ini. Sebagai pemimpin Keraton, ia terkesan tidak mau terburu-buru atau terlalu berkomentar terkait pernyataan George, sebab ia pun melihat belum adanya itikad baik dari George untuk minta maaf. • Achiel Suyanto, SH MBA (Praktisi Hukum) Pengamat tentang kasus ini yang menjelaskan gambaran tentang kelanjutan perkara kasus George Aditjondro di ranah hukum. Ia juga termasuk dalam tim asistensi RUUK DIY, sehingga sedikit banyak ia peduli dan paham kondisi masyarakat Yogyakarta yang memiliki keterikatan dengan Keraton Yogyakarta. 	<p>dipermasalahan dalam kasus George Aditjondro bukan hanya soal pernyataannya menghina Kraton, tapi motif di balik itu.</p> <p>FUNGSI: Menarik adanya pemaparan tersebut di dalam artikel. Kedaulatan Rakyat terkesan menempatkan isu tambahan. Analisis dari praktisi hukum dijadikan perspektif dalam melihat kasus George dari sisi lain. Dalam hal ini KR seolah mengajak khalayak untuk berpikir kritis. Jangan hanya berfokus pada pernyataan kontroversial George saja, namun harus diperhatikan apakah ada aktor lain yang mempengaruhi George dalam mengeluarkan pernyataan ketika menjadi pembicara di diskusi publik.</p> <p>Pelantun Wacana: Sri Sultan Hamengku Buwono X</p> <p>1.(pada par.3).....”Kalau punya kemauan pasti menghubungi.....”</p> <p>FUNGSI: Pernyataan ini terkesan menunjukkan adanya keraguan Sri Sultan HB X terhadap niat minta maaf dari George Aditjondro. Sultan</p>	<p>akhir paragraf (9)). Pemaparan pendapat Achiel seolah memberikan gambaran tentang arah kelanjutan kasus George terkait dengan tanggapan dari Sultan HB X. Achiel menganalisis dari segi hukum, sebab kasus George sudah ditangani pihak kepolisian. Adanya narasumber selain Sultan, menjadi hal yang menarik. Sebab Sultan HB X memang tidak mau berkomentar banyak tentang kasus tersebut, sehingga dengan adanya analisis dari praktisi hukum memberikan perspektif lanjutan bahkan menambah isu baru.</p>	<p>menyebabkan George mengeluarkan pernyataan kontroversial. Alasannya disini bisa terkait dengan banyak hal, misalnya latar belakang, ada dorongan dari pihak tertentu atau ada kepentingan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “menyesatkan” Bermakna membawa ke jalan yang salah. Pemakaian kata “menyesatkan” di paragraf terakhir, memberi penekanan bahwa materi serta pernyataan yang dikeluarkan George pada saat diskusi bisa membawa pemikiran orang lain ke jalan yang salah atau keliru. <p>-Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sultan Hamengku Buwono X • George Aditjondro • George Aditjondro belum menghubungi Sultan HB X untuk meminta maaf • Praktisi Hukum • Permintaan maaf tidak akan menghapus pidana
--	---	--	---

	<p>seolah merasa niatan tersebut hanya ucapan semata, tidak ada aksi lanjut yang ia dapati. Melalui pernyataan ini, pemikiran khalayak digiring untuk menilai George yang sebelumnya telah <i>woro-woro</i> memiliki niat untuk minta maaf kepada Sultan, namun kenyatannya tidak demikian. Dalam hal ini Sultan disosokan sebagai pihak yang memegang kartu AS untuk meredakan amarah masyarakat terkait kasus ini.</p> <p>Pelantun Wacana: Achiel Suyanto, SH MBA (Praktisi Hukum)</p> <p>1.(pada par. 6) “Kalau dipenuhi ya harus diproses. Tidak bisa selesai dengan permintaan maaf”.....</p> <p>2.(pada par. 7) Menurutnya, meski yang melaporkan bukan kerabat Keraton namun secara hukum hal itu sudah memenuhi syarat dan bisa diproses.....</p> <p>.“Siapa saja yang mengerti ada tindak pidana harus melaporkan”</p> <p>FUNGSI: Adanya narasumber</p>	<p>-Exemplaars</p> <p>Pemaparan dari praktisi hukum, Achiel Suyano, pada paragraf 4 menjadi acuan dalam menganalisis kelanjutan kasus George. Dari segi hukum, permintaan maaf dari seseorang yang kasusnya sudah bergulir di meja kepolisian, tidak bisa dengan mudah menghentikan penanganan kasus tersebut. Permintaan maaf hanya bisa mengurangi aspek pidana, seperti pengurangan hukuman jika terbukti bersalah.</p>
--	---	---

	<p>dari praktisi hukum dalam artikel ini memberikan gambaran terkait niat minta maaf George dan tanggapan Sultan HB X. Pendapat ini menunjukkan bahwa jika George telah melakukan permohonan maaf, kemudian Sultan menerima permintaan maaf itu pun tidak akan mengubah status hukum yang membelit George. Sehingga hal ini semakin mempertegas bahwa niat George untuk meminta maaf tidak akan memberikan pengaruh yang banyak untuk nasibnya. Apalagi niat minta maaf itu juga belum terlaksana. Kasus ini bisa selesai jika pelapor mencabut laporannya. Namun hal itu sepertinya susah terjadi, sebab masyarakat Yogyakarta sudah terlanjur sakit hati dengan ucapan George.</p>		
--	--	--	--

Analisis Teks 4

-Judul : Aditjondro Minta Maaf Sultan

-Edisi : 8 Desember 2011

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>- Obyek Wacana Permohonan maaf George Aditjondro kepada Sultan dan masyarakat kota Yogyakarta. Serta aksi dari Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) yang menentang pernyataan George Aditjondro.</p> <p>-Pelibat Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Aditjondro Pengajar serta penulis buku-buku kontroversial dan telah mengeluarkan pernyataan yang menyinggung atau menghina Keraton Yogyakarta. • Sri Sultan Hamengku Buwono X Pemimpin tahta tertinggi di Keraton Yogyakarta yang memiliki kekuasaan sebagai raja dan dihormati penuh oleh masyarakat Yogyakarta. 	<p>-Jenis Wacana Dilantunkan Wartawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (pada <i>lead</i> berita) George yang datang ditemani beberapa rekannya bermaksud untuk menemui Sri Sultan Hamengku Buwono X dan akan meminta maaf secara langsung. Namun pertemuan itu belum terlaksana lantaran Sultan tidak berada di tempat. FUNGSI: SKH Kedaulatan Rakyat melalui tulisan wartawannya hendak menunjukkan adanya itikad baik yang dilakukan George Aditjondro untuk meminta maaf. Hanya saja niatan George masih mendapat kendala. 2. (pada par.6) Sebelumnya George menyatakan akan meminta maaf kepada masyarakat Yogya dan Raja Keraton Yogyakarta terkait 	<p>-Placement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ini berada pada halaman pertama di Kedaulatan Rakyat edisi 2 Desember 2011 dan menjadi <i>headline</i> dengan judul pemilihan foto yang mencolok. • Judul : “Aditjondro Minta Maaf Sultan” (sub judul: Mengaku Bersalah, Datangi Kepatihan). Dari judul ini menggambarkan George sadar bahwa ia bersalah. Dan berusaha untuk meminta maaf kepada Sultan demi menghapus kesalahannya atas pernyataan yang telah dilontarkannya. • Niat dan aksi permintaan maaf dari George Aditjondro tercermin di awal artikel hingga akhir paragraf. Dalam 	<p>-Metaphors</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Minta” Penggunaan kata ‘minta’ dari dalam judul artikel sudah menunjukkan makna memohon untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini yang menjadi permohonan George Aditjondro ada maaf dari Sultan HB X. • “padat sekali acaranya” Kalimat yang terdapat pada paragraf 3 ini menunjukkan Sultan HB X yang memiliki kegiatan yang banyak dan tidak memiliki waktu luang. Penggunaan kalimat ini seolah mengkerdikan kesempatan George untuk bertemu Sultan secara langsung. • “enggan mengemukakan” Menurut KBBI, “enggan” berarti tidak mau atau tidak suka. Penggunaan kalimat ini dalam

<ul style="list-style-type: none"> • FMY (Forum Masyarakat Yogyakarta) Merupakan organisasi atau kelompok masyarakat yang membela Keraton Yogyakarta. Dalam kasus ini, FMY lah yang melaporkan ucapan George Aditjondro kepada pihak berwajib (polisi) karena dianggap telah melecehkan lembaga adat Keraton Yogyakarta. • Kepolisian Daerah Yogyakarta Pihak yang menangani dan menyelidiki kasus penghinaan laporan dari FMY terkait pernyataan George Aditjondro yang disinyalir menghina Keraton Yogyakarta. Pihak ini pula yang masih menjamin keamanan George Aditjondro terkait adanya aksi dari masyarakat yang menentang pernyataan kontroversial tersebut. <p>-Pelantun Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan Memiliki peranan yang besar dalam membuat dan menyajikan informasi terkait 	<p>ucapannya saat diskusi “Membedah Status Sultan Ground dan Pakualaman.”</p> <p>(pada par.7) Untuk itu George yang sudah mengakui kesalahannya berharap dapat bertemu Sultan secepatnya. Kedatangannya ke kepatihan merupakan salah satu bentuk usaha untuk meminta maaf.Tidak ada pihak lain yang mengendalikan dan tidak direncanakan.</p> <p>FUNGSI: SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan George sadar bahwa pernyataannya menimbulkan masalah dan menyinggung banyak pihak. Karena itu ia ingin segera meminta maaf kepada pihak yang tersinggung dengan ucapannya. Dalam beberapa paragraf tersebut juga menegaskan niat dan aksi permohonan George kepada Sultan HB X, namun belum mendapat tanggapan.</p> <p>3. (pada par.9) Meski sudah dilaporkan ke Mapolda, sejauh ini pihaknya belum menerima surat panggilan.</p>	<p>artikel ini George paham bahwa ia telah salah dalam membuat plesetan yang berakhir dengan adanya protes dari berbagai pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lead</i> berita hingga paragraf 8 menunjukkan bagaimana rasa bersalah George dan usaha permintaan maaf yang hendak ia sampaikan kepada Sultan dan masyarakat Yogyakarta. Termasuk usahanya yang belum berhasil untuk bertemu dengan Sultan. • Paragraf 9 menunjukkan bahwa George tidak hanya akan berurusan dengan bagaimana ia harus minta maaf, melainkan ada proses hukum yang akan ia jalani terkait laporan dari FMY kepada Polda DIY terkait pernyataannya. • Kemudian disusul paragraf 11 yang menunjukkan bentuk protes dari elemen masyarakat terkait pernyataan kontroversial yang dikeluarkan George. 	<p>paragraf 4 seolah menunjukkan ketidakmauan atau ketidaksukaan George untuk menjelaskan kepada wartawan dan khalayak terkait detail yang akan dibicarakan ketika bertemu Sultan HB X.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “inisiatif” Dari pengertian menurut KBBI, inisiatif adalah usaha atau tindakan mula-mula; diprakarsai. Terkait dengan konteks pada paragraf 7, dapat dilihat penggunaan kata tersebut sebagai penekanan bahwa keinginan George untuk meminta maaf adalah usaha yang berasal dari dirinya tanpa campur tangan dari pihak lain. • “meluruskan” digunakan pada paragraf 8. Dalam hal ini merujuk usaha George Aditjondro untuk memperbaiki masalah yang berasal dari pernyataannya dan mengembalikan keadaan ke dalam kondisi normal. • “plesetan” (pada paragraf 10) Dapat diartikan lelucon yang sengaja dibuat oleh seseorang dari sebuah fakta atau peristiwa.
--	---	--	--

<p>peristiwa yang dibahas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • George Aditjondro Pengajar serta penulis buku-buku kontroversial dan telah mengeluarkan pernyataan yang menyinggung atau menghina Keraton Yogyakarta. 	<p>(pada par. 13) Meski Polda sudah menjamin pengamanan, namun sementara ini George memilih tinggal di hotel. FUNGSI: Kedua paragraf ini ditempatkan terpisah atau tidak berdekatan. Wartawan KR hendak memaparkan bagaimana tindak lanjut Polda DIY, namun nyatanya George tidak menerima bentuk dari tindak lanjut Polda DIY. Baik dalam bentuk surat panggilan atau tindakan lainnya. Pemaparan ini seolah menegaskan George masih dalam posisi “aman”. Tetapi terdapat koherensi pembeda antar dua paragraf tersebut, dimana George belum menerima surat panggilan dari Polda, namun pihak Polda tetap menjamin keamanan George. Wartawan seolah mencium adanya keanehan atau kontra fakta disini.</p> <p>4. Paragraf 11 menunjukkan reaksi-reaksi yang dikeluarkan oleh FMY (Forum Masyarakat Yogyakarta) terkait pernyataan kontroversial George Aditjondro.</p>	<p>Peletakan kedua hal yang harus dihadapi George pada akhir paragraf seolah menunjukkan konsekuensi yang harus diterima George. Selain permintaan maaf kepada Sultan, George juga menghadapi aksi keras dari masyarakat serta proses hukum dari pihak kepolisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada paragraf 12 dan akhir paragraf menunjukkan optimisme George untuk mendapatkan permintaan maaf dari Sultan yang akan berdampak untuk meredakan kemarahan masyarakat. Salah satu bentuk harapannya dinyatakan sebagai berikut “Saya tunggu <i>green light</i> dari Sultan”. 	<ul style="list-style-type: none"> • “tidak pada tempatnya” Penggunaan kalimat ini pada paragraf 10 hendak menegaskan bahwa pernyataan kontroversial berupa lelucon yang dibuat oleh George Aditjondro tidak pantas dikeluarkan dalam situasi tersebut. • “kecaman” (pada paragraf 11) Menurut KBBI, ke-cam-an berarti teguran yang keras, kritikan; celaan. Penggunaan kata tersebut menunjukkan George mendapatkan teguran keras dari FMY akibat mengeluarkan plesetan yang menyakitkan. • “green light” Dalam bahasa Indonesia berarti lampu hijau, merupakan sebuah istilah yang berarti sebuah tanda persetujuan untuk melangkah atau melakukan sesuatu. Pemakaian istilah “green light” pada paragraf terakhir menunjukkan harapan George terhadap Sultan HB X untuk menerima permintaan maafnya, agar ia dapat mengambil langkah selanjutnya untuk menyelesaikan
---	---	---	--

	<p>FUNGSI: Dalam paragraf ini menunjukkan bahwa aksi FMY tidak hanya sekedar melapor ke Polda DIY, tetapi juga mendatangi kediaman George sebagai bentuk pengusiran dan mengecek keberadaan George di Yogyakarta. Pada paragraf ini juga menegaskan bahwa aktor utama yang melaporkan kasus penghinaan tersebut adalah pihak FMY.</p> <p>Pelantun wacana: George Aditjondro</p> <p>1. (pada par.3)“Belum bisa ditemui karena beliau padat sekali acaranya. Protokol akan bicara dulu sama Sultan. . . . “ (pada par.7) Kedatangannya ke kepatihanuntuk meminta maaf dan inisiatif itu datang dari dirinya sendiri. “Namanya juga usaha. Aku salah ya memang aku harus usaha.”</p> <p>FUNGSI: arah pernyataan ini menunjukkan adanya niat dan usaha permohonan maaf yang dilakukan George, namun masih terdapat kendala untuk mencapai tujuannya.</p> <p>2. (pada par. 10)</p>		<p>masalah tersebut.</p> <p>-Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> •George Aditjonro •Permintaan Maaf •Sultan Hamengku Buwono X •Polda DIY •FMY (Forum Masyarakat Yogya) <p>-Catchprasses</p> <ul style="list-style-type: none"> •“Harus saya sampaikan dulu ke Sultan. Kalian sabar” (paragraf 5) <p>Pernyataan yang dikeluarkan George Aditjondro ini seolah ingin menghentikan kejaran wartawan untuk mendapatkan keterangannya sementara waktu. Sebab ia sendiri mengakui belum berani memberikan komentar lebih lanjut sebelum Sultan HB X yang merupakan Raja Keraton Yogyakarta, menerima permohonan maaf darinya. Hal ini menarik, sebab George menganggap Sultan HB X adalah kunci untuk menyelesaikan masalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> •“Aku salah ya memang aku harus usaha” (paragraf 7) <p>Setidaknya ini menunjukkan</p>
--	--	--	--

	<p>“Itu saya serahkan pada panitia. Saya ingin membatasi khusus tentang plesetan saya yang tidak pada tempatnya”</p> <p>FUNGSI: Pada pemaparannya George sadar bahwa ia telah mengeluarkan kalimat yang menyinggung banyak pihak. Dan ia pun cenderung berserah atas putusan atau penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib.</p> <p>3.(pada par.11 dan 12).....sejak kejadian itu George menyatakan baru akan membersihkan rumahnya setelah bertemu Sultan.....</p> <p>”Saya tunggu <i>green light</i> dulu dari Sultan, baru benahi rumah,” tutur George.</p> <p>FUNGSI: Arah wacana ini menegaskan bahwa George beranggapan Sultan adalah kunci dari pereda masalah atas kasusnya. Jika Sultan berkenan memaafkannya, George seolah yakin kondisi akan kembali normal dan rakyat Yogya diharapkan turut memaafkan pernyataan George.</p>		<p>kesadaran George bahwa pernyataan yang dikeluarkannya memang salah dan ia pantas untuk menanggung akibatnya, serta mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut.</p> <p>-Depiction “Saya tunggu <i>green light</i> dari Sultan, baru benahi rumah.” Pernyataan tersebut menjadi gambaran sebenarnya bahwa George memang tidak bisa bebas melakukan apa-apa di Yogyakarta, semenjak pernyataan kontroversialnya dipermasalahkan oleh masyarakat Yogya. Keputusan atau lebih tepatnya pemberian maaf dari Sultan HB X akan memberikan pengaruh besar bagi George untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya.</p> <p>-Visual images Dalam artikel ini hanya menggunakan foto George Aditjondro dalam <i>pose</i> yang umum.</p>
--	---	--	--

Analisis teks 5

-Judul : Desak Kapolda Periksa Aditjondro

-Edisi : 9 Desember 2011

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>-Obyek Wacana Ketidakpuasan FMY terhadap penanganan kasus George Aditjondro yang dilakukan Kepolisian Daerah. FUNGSI: Menggambarkan masyarakat khususnya pelapor (FMY) yang tidak sabar menunggu kelanjutan dari laporan mereka terhadap Aditjondro. Massa terus mendesak Kapolda untuk bergerak cepat, namun pihak kepolisian berdalih ada proses atau prodesur yang harus dilewati dalam penanganan kasus dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal ini yaitu kasus perbuatan tidak menyenangkan.</p> <p>-Pelibat Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> George Aditjondro Dalam wacana ini merupakan aktor tunggal 	<p>Jenis Wacana -Pelantun Wacana: Wartawan 1.(pada <i>lead</i> berita) FMY mendesak Kapolda DIY, segera menindaklanjuti laporan mereka.....massa FMY memberikan sebuah borgol kepada Kapolda sebagai simbol agar George Junus Aditjondro segera diperiksa. FUNGSI: Pemaparan ini menunjukkan desakan dari FMY kepada Kapolda untuk segera menyelesaikan kasus George Aditjondro. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kepolisian bergerak lambat dalam menindaklanjuti laporan dari FMY. Selain itu, pemberian borgol kepada Kapolda sebagai simbol adanya dorongan yang kuat dari FMY agar kepolisian</p>	<p>-Placement</p> <ul style="list-style-type: none"> Artikel ini tidak berada di halaman pertama di Kedaulatan Rakyat edisi 9 Desember 2011. Artikel ini berada pada rubrik “Hukum dan Kriminal” Judul: “Desak Kapolda Periksa Aditjondro” (sub judul: Forum Masyarakat Yogyakarta). FUNGSI: Pemilihan judul ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terkait kinerja Kepolisian Daerah Yogyakarta. Dalam hal ini, pihak yang masih “rajin” untuk mengontrol kasus Aditjondro adalah FMY. Mereka lah yang kembali mendesak Polda DIY untuk mengambil langkah cepat dan segera menangkap Aditjondro. Penyosokan George Aditjondro dalam artikel ini pun masih 	<p>-Metaphors</p> <ul style="list-style-type: none"> “mendesak” Menurut KBBI, mendesak berasal dari kata desak yang artinya mendorong atau memaksa untuk melakukan sesuatu. Penggunaan kata “mendesak” di dalam <i>lead</i> berita, merujuk pada konteks desakan FMY yang memaksa pihak kepolisian daerah DIY untuk segera menyelesaikan kasus dan menangkap George Aditjondro. “tidak mencabut” (paragraf 2) Dalam konteks ini berarti FMY tidak akan menarik kembali pernyataan yang sudah dikeluarkan atau membatalkan pelaporan terhadap Aditjondro. “hukum ditegakkan” (paragraf 2)

<p>terkait pernyataan kontroversial yang telah diucapkannya. Masyarakat ingin George segera ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah, agar tidak bisa berkeliaran bebas setelah penghinaan yang telah dilakukannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keraton Yogyakarta Lembaga budaya yang telah dihina George Aditjondro melalui pernyataannya. Walaupun masyarakat antusias dalam memperkarakan George, pihak Keraton cenderung tenang di dalam menanggapi kasus tersebut. • Panitia Penyelenggara Diskusi Terbuka Sebagai pihak yang akan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaran diskusi terbuka di UGM, dimana George menjadi pembicara dan mengeluarkan pernyataan kontroversial. 	<p>segera menangkap George, sehingga George tidak bisa bebas berkeliaran dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>2. (pada par. 2) Koordinator aksi, Mas Bei menegaskan kendati George sudah meminta maaf, FMY tidak akan mencabut laporannya.... ..</p> <p>FUNGSI: Kedaulatan Rakyat menunjukan bahwa FMY yang diwakili Mas Bei kembali menegaskan tidak ada rasa gentar untuk tetap memperkarakan kasus George. Sakit hati yang sering dirasakan masyarakat Yogya, khususnya perkara RUUK yang terlalu lama menggantung, membuat masyarakat sulit untuk segera memaafkan pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghina atau mencemarkan nama baik Keraton Yogyakarta. Tindakan masyarakat yang tak gentar untuk memperkarakan kasus George juga sebagai bentuk pembelajaran kepada pihak mana saja untuk lebih berhati-hati dalam mengkritisi sesuatu yang berkaitan dengan</p>	<p>bernada negatif. Walaupun arah wacana artikel ini menunjukan ketidakpuasan masyarakat terkait kinerja kepolisian dalam menangani kasus tersebut, namun masih Kedaulatan Rakyat terkesan masih menanggapi permintaan maaf Aditjondro, yang dianggap tidak akan menghilangkan tindak pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari <i>lead</i> hingga paragraf kedua memaparkan kekecewaan masyarakat terhadap Polda DIY yang dianggap lambat dalam menyelidiki kasus penghinaan yang dilakukan George Aditjondro tersebut. Pada bagian ini dipaparkan pula kondisi masyarakat yang tidak terlalu menerima pertanggungjawaban Aditjondro melalui permintaan maaf. Mereka tetap menuntut kasus ini diselesaikan menurut hukum yang berlaku. • Tanggapan dari pihak kepolisian daerah DIY yang diwakili Kapolda DIY ditempatkan pada paragraf 3 hingga 5. Pada bagian artikel tersebut, 	<p>Dalam hal ini, menjadi gambaran akan harapan FMY kepada kepolisian untuk tetap mempertahankan dan melaksanakan hukum seadil-adilnya, terlebih untuk kasus penghinaan terhadap Keraton Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “disakiti terlalu banyak” Menunjukan sudah banyak kejadian atau peristiwa sensitif yang mengecewakan masyarakat Yogyakarta. Sebelumnya masih tentang RUUK yang menggantung. Dan kini menghadapi pernyataan bernada menghina. • “berkomitmen” Penggunaan kata “berkomitmen” pada paragraf 3, merupakan bentuk penegasan Kapolda terhadap janjinya untuk menuntaskan kasus Aditjondro. Penekanan ini digunakan untuk menenangkan masyarakat yang tidak sabar menunggu penanganan kasus tersebut. • “mengimbau” Mengimbau berarti
--	---	--	--

<p>-Pelantun Wacana</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Wartawan</p> <p>Dalam wacana ini, wartawanlah yang memiliki peranan yang besar dalam mengemas fakta serta informasi yang disajikan kepada khalayak terkait desakan FMY terhadap penanganan kasus George Aditjondro. Wartawan pun akan menggiring pemikiran khalayak dalam menilai sosok George.</p> <p>Mas Bei (Koordinator aksi FMY)</p> <p>Sebagai koordinator aksi FMY, Mas Bei sangat vokal dalam menyuarkan tuntutan masyarakat terhadap penanganan kasus George. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya pun menegaskan keinginan FMY yang tidak mau mencabut laporan, walaupun George telah meminta maaf sekalipun.</p> <p>Brigjen Pol Drs Tjuk Basuki (Kapolda DIY)</p> <p>Jabatannya sebagai kepala</p> 	<p>Yogyakarta.</p> <p>3.(pada par. 3) Kapolda yang menemui massa mengatakan, pihaknya sejak awal berkomitmen untuk memproses laporan FMY. Namun, setiap langkah yang diambil harus sesuai dengan prosedur yang ada.</p> <p>FUNGSI: Dituliskannya keterangan dari Kapolda terkait adanya desakan dari FMY, sebagai bentuk tanggapan bahwa pihak kepolisian serius dalam menangani kasus George Aditjondro. Hanya saja prosesnya tidak bisa instan. Ada banyak prosedur yang harus dilalui terlebih dalam hal pemanggilan saksi dan lapor. Dalam hal ini kepolisian daerah disosokan sebagai pihak berwajib yang berusaha segera menangani kasus George yang meresahkan masyarakat Yogya, namun memang dibutuhkan waktu dan proses untuk menyelesaikannya.</p> <p>4.(pada par. 5).....pihaknya telah memeriksa 4 orang dari saksi pelapor. Pihak panitia penyelenggara forum diskusi terbuka juga akan</p>	<p>dipaparkan gambaran prosedur penanganan suatu kasus. Hal ini sepertinya dimaksudkan untuk “menenangkan” emosi masyarakat dalam menanti penyelesaian kasus Aditjondro. Selain itu, gambaran tersebut berguna untuk member pengertian kepada masyarakat agar lebih bersabar terkait banyaknya prosedur yang harus dilewati. Untuk lebih meyakinkan lagi terkait kinerja Polda DIY, pada bagian tersebut pun ditempatkan kutipan pernyataan Kapolda DIY yang menjelaskan posisi penanganan kasus Aditjondro agar masyarakat mengetahui sampai dimana kelanjutan kasus tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Kedaulatan Rakyat menggunakan pemikiran dari praktisi hukum sebagai bentuk tanggapan terhadap permintaan maaf yang telah dikeluarkan George Aditjondro. Tanggapan praktisi hukum yang merupakan ketua APKY, ditempatkan pada paragraf 6 hingga akhir paragraf. Dengan perspektif tersebut, dijelaskan bahwa usaha</p> 	<p>menyerukan dengan sungguh-sungguh. Penggunaan kata “mengimbau” di paragraf 4, jelas merupakan bentuk penegasan Kapolda untuk mengajak masyarakat Yogya agar bersabar dan tidak cepat bereaksi tanpa alasan jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>“membalikkan pikiran”</p> <p>Berarti mengubah pemahaman atau pemikiran seseorang untuk beralih ke hal lain.</p> <p>“mendampingi” (paragraf 6)</p> <p>Mengarah kepada kesiapan para advokat (APKY) untuk menyertai langkah FMY dalam memperkarakan George Aditjondro di ranah hukum.</p> <p>-Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Forum Masyarakat Yogyakarta</p> <p>Kapolda DIY</p> <p>Desakan untuk segera menyelesaikan kasus Aditjondro</p> <p>George Aditjondro</p> <p>APKY (Advokat Peduli Kehormatan Yogyakarta)</p> <p>Sejumlah Advokat</p>
---	---	--	--

<p>Kepolisian Daerah, menjadikan Tjuk Basuki adalah pihak yang paling didesak FMY untuk segera menangkap dan memenjarakan George Aditjondro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>M.Syafei (Koordinator Advokat Peduli Kehormatan Yogyakarta (APKY)) Selain FMY yang tak pantang menyerah untuk memperkarakan George, ada lagi sekelompok advokat yang ikut mendukung gerakan FMY. Dalam wacana ini, M. Syafei sebagai koordinator menyuarakan keinginan advokat untuk mendampingi FMY sebagai kuasa hukum dan ikut menyomasi George Adijtondro.</p> 	<p>diperiksa.....</p> <p>FUNGSI: Dituliskannya pernyataan Kapolda tentang kelanjutan penanganan kasus George sebagai bukti pendukung terkait keseriusan kepolisian daerah dalam menyelidiki kasus George. Selain itu, pemaparan tentang penanganan kasus George juga menunjukan bahwa pihak selain George juga dilibatkan untuk menjadi saksi dalam penyelidikan. Misalnya Panitia Penyelenggara Diskusi dimana George menjadi pembicara. Hal ini semakin memperkuat bahwa kasus George memang ditangani serius dan tidak ada <i>excuse</i> bagi siapapun yang menghina Keraton Yogyakarta.</p> <p>5.(pada par. 8).....meskipun George dalam pernyataannya menyinggung Kraton, namun pelapor tidak harus Sultan maupun orang dari pihak Kraton. Karena Kraton merupakan milik semua masyarakat Yogya.....</p> <p>FUNGSI: Kedaulatan Rakyat mengambil pernyataan dari M.Syafei untuk memperkuat latar bagaimana kasus ini</p>	<p>permintaa maaf George Aditjondro tidak berpengaruh apa-apa dalam ranah hukum. Selain itu, posisi praktisi hukum tersebut mendukung tuntutan yang dilakukan FMY dan mereka berkomitmen untuk menjadi kuasa hukum FMY.</p>	<p>mendampingi tuntutan FMY</p> <p>-Exemplaars Pada paragraf 4, pihak kepolisian memberikan contoh prosedur penanganan kasus. Ada banyak tahap yang dilewati untuk meminta keterangan saksi, bahkan menangkap terlapor jika ditemukan bukti pelanggaran. Penjelasan prosedur penanganan kasus ini guna memberikan pemahaman kepada massa (FMY) yang terus mendesak kepolisian untuk segera menangkap Aditjondro. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat bersabar menunggu kinerja pihak kepolisian.</p> <p>-Visual images Di dalam artikel ini, menggunakan <i>visual images</i> berupa foto yang menggambarkan koordinator FMY (Mas Bei) menyerahkan borgol kepada Kapolda DIY, sebagai simbol untuk segera menangkap George Adijtondro.</p>
--	--	---	---

sampai ditangani oleh pihak Kepolisian. Walaupun Keraton tidak mengambil langkah apapun dalam ranah hukum, namun pelaporan yang dilakukan masyarakat atau lebih tepatnya diwakili FMY pun dikatakan sah. Terlebih bagi masyarakat Yogyakarta memang memiliki keterikatan terhadap Keraton. Sebab bagi mereka, Keraton Yogyakarta adalah milik masyarakat Yogya juga.

**Pelantun Wacana: Mas Bei
(Koordinator aksi FMY)**

1. (pada par.2)”.....masyarakat Yogya sudah disakiti terlalu banyak mulai dari RUU Keistimewaan dan sekarang perkataan dia (George Junus Aditjondro, red)”.....

FUNGSI: Adanya kutipan pernyataan dari perwakilan FMY ini, menunjukkan bahwa masyarakat sudah terlalu jengah dan capek menghadapi kasus sensitif. Dan sekarang mereka harus menerima seorang terpelajar membuat pernyataan yang tidak akademis dan menghina nama baik Keraton

Yogyakarta yang menjadi simbol budaya daerah Yogyakarta.

Pelantun Wacana: Brigjen Pol Drs Tjuk Basuki (Kapolda DIY)

1. (pada par. 4) ".....saya harap masyarakat sabar karena semua ada aturannya.....
....."

FUNGSI: Arah pernyataan ini mengarahkan khalayak untuk memiliki pemikiran bahwa memang dibutuhkan waktu dan proses untuk menangani dan menyelidiki kasus George Aditjondro. Dalam wacana ini kepolisian disosokan sebagai pihak yang berusaha menjalani tugas dan kewajibannya sesuai prosedur yang ada dan berusaha tetap netral dalam menangani kasus yang sensitif bagi masyarakat Yogyakarta.

Pelantun Wacana: M.Syafei (Koordinator Advokat Peduli Kehormatan Yogyakarta (APKY))

1. (pada par. 7) "Meskipun ada permintaan maaf, namun dari sisi hukum tidak bisa menghapus tindak

pidana.....”

FUNGSI: Kedaulatan Rakyat menempatkan pernyataan dari praktisi hukum ini sebagai gambaran atas situasi yang tengah dan akan dialami George Aditjondro. Niatan permintaan maaf dari George Aditjondro yang sebelumnya telah digembar-gemborkan ke berbagai media tidak akan memberikan pengaruh atau keringanan dalam penanganan kasus di ranah hukum sebagai bentuk dari pelanggaran pidana.

mine veritas

QUESTION GUIDE UNTUK REDAKTUR PELAKSANA

Ditujukan kepada Hudono (Redaktur Pelaksana)

1. Biodata narasumber yang diwawancarai (latar belakang, pendidikan, sejak kapan bekerja di Kedaulatan Rakyat, alasan bekerja disini, apakah ada pengalaman sebelumnya bekerja di media lain, pernah ikut organisasi lain sebelum bergabung ke KR)
2. Sebelum merujuk ke topik penelitian, terlebih dahulu bagaimana sistem dan prosedur kerja di Kedaulatan Rakyat (alurnya)?
3. Bagaimana kebijakan redaksional yang berlaku dalam Kedaulatan Rakyat? (terkait aturan2)
4. Bagaimana proses rapat redaksi dalam KR? Bisa diceritakan *step by step*, misalnya siapa yang memimpin rapat, kemudian alur rapat?
5. Bagaimana rutinitas organisasi dari pra dan paska peliputan?
6. Layaknya sebuah media yang dipengaruhi berbagai macam kepentingan. Pihak mana saja yang mempengaruhi? Bisa dijelaskan seberapa besar pengaruh atau bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi kinerja redaksi KR dalam melakukan proses pembuatan berita? (misalnya *influence* dari pemilik, pengiklan, pemerintah, Keraton misalnya, kepentingan kelompok tertentu, masyarakat)?
7. Media tidak bisa berdiri tanpa *support* iklan. Lalu bagaimana pengaruh keberadaan iklan terhadap kinerja redaksi, misalnya terkait ukuran pemberitaan atau *content* (isi) berita?
8. Terkait dengan pemberitaan seputar kasus George Aditjondro. Bagaimana penentuan isu yang akan dibahas terkait kasus George Aditjondro? Apa ada semacam *mapping* yang khusus mem-*follow-up* kelanjutan kasus tersebut?

9. Apakah semua yang terkait kelanjutan kasus Aditjondro, terus menjadi perhatian redaksi KR dan kemudian diliput? Adakah kriteria khusus dalam menentukan peliputan berita terkait kasus tersebut?
10. Untuk isu sensitif seperti ini, apakah ada wartawan khusus atau bagaimana menentukan wartawan yang bertugas untuk meliput kasus seperti ini? Faktor apa saja yang diperhatikan dalam memilih wartawan yang akan diberikan penugasan liputan?
*Menurut pengamatan peneliti, wartawan inisial Ayu/Ast yang sering meliput kasus George Aditjondro
11. Apakah di dalam redaksi sekaligus ditentukan narasumbernya? Atau diserahkan sepenuhnya kepada wartawan dan tergantung dengan situasi di lapangan?
12. Bagaimana pertimbangan dalam penentuan judul serta apakah berita ini cocok menjadi *headline* atau tidak? Apa pertimbangannya dalam rapat redaksi? Dari pengamatan peneliti, berita tentang George Aditjondro sering menjadi *headline*. Bagaimana pemilihan foto dan sebagainya?
13. Menurut saya ini kasus yang sensitif, terlebih terkait dengan Keraton Yogyakarta. Kondisi di luar sana masyarakat menaruh amarah terhadap perbuatan Aditjondro. Bagaimana KR menyosokan atau mencitrakan George?
14. Di suatu artikel, saya melihat KR seolah mengarah kepada asumsi bahwa ada motif/kepentingan lain/pihak yang mendukung pernyataan Aditjondro. Menurut bapak, apakah George adalah aktor tunggal di balik kasus ini?
15. menurut saya, ada teori *bad news is a good news*. Apakah ini berlaku pada KR juga dalam memberitakan Aditjondro, terlebih ketika fakta di lapangan mengarah pada hal yang negatif?

16. Dalam kasus ini ada pihak yang berkonsentrasi terhadap kelanjutan penanganan kasus, yaitu FMY dan polisi sebagai penyelidik kasus. Bagaimana KR dalam mengekspos pihak-pihak tersebut? Proses *follow-up*?
17. Kenapa hanya FMY serta polisi, praktisi hukum yang banyak bersuara. Apakah KR tidak menyoroti suara masyarakat non-FMY dalam menilai kasus ini, terlebih ini kan kasus sensitif yang terkait martabat Keraton Yogyakarta (kaitannya erat dengan masyarakat Yogyakarta)
18. Kenapa narasumber yang diangkat lebih banyak yang kontra dengan Aditjondro, apakah itu merupakan keputusan redaksi atau bagaimana? Memang tidak ada pihak yang pro (membela) atau setidaknya netral dalam menanggapi kasus Aditjondro?
19. Terkait pemberitaan kasus Aditjondro, apakah ada *frame* khusus yang ingin dibentuk KR? Bagaimana pandangan Kedaulatan Rakyat (sebagai media massa) terhadap kasus penghinaan yang dilakukan Aditjondro dan reaksi yang muncul dari masyarakat?
20. Bagaimana menentukan porsi-porsi berita yang menjadi *headline*. Terlebih di bulan Desember ada berita menarik tentang kasus bentrokan massa terkait sengketa lahan di Bima, lalu ada kasus korupsi wisma atlet? Bagaimana jika ada kasus yang lebih menarik, bukankah kasus Aditjondro ini bisa saja kalah nilai beritanya?
21. Ketika berita sudah diturunkan terkait kasus penghinaan ini, apakah ada pihak yang menuntut atau *complain* terkait pemberitaan yang misalnya tidak sesuai? Misalnya Aditjondro sendiri, atau dari FMY atau pihak lain? Ketika ada *complain*, bagaimana KR menanggapi? Apakah ada pemberian hak jawab atau ralat berita misalnya?
22. Bagaimana hubungan dan pengaruh Keraton Yogyakarta terhadap SKH Kedaulatan Rakyat sendiri? Adakah pengaruhnya terhadap kinerja KR?

23. Sebagai koran lokal, bagaimana KR melihat kasus ini? Apa perlu ada *blow up* besar-besaran, terlebih terkait dengan Keraton Yogyakarta?
24. Bagaimana hubungan Kedaulatan Rakyat dengan Aditjondro. Apakah ada suatu hubungan tertentu, atau KR berada pada posisi netral?
25. Selaku redaktur pelaksana, bagaimana bapak sendiri memberikan pendapat terhadap pernyataan kontroversial yang dilakukan Aditjondro beserta kelanjutan kasusnya?
26. Ketika wartawan terlalu kritis, apakah redaktur akan meminta untuk merubah untuk tidak terlalu kritis atau bagaimana?
27. Dalam agenda wacana dalam redaksi KR, kapan mulai menyatakan untuk tidak mengekspos kasus Aditjondro?

***QUESTION GUIDE* UNTUK WARTAWAN**

Ditujukan kepada Dwi Astuti dan Wahyu Prianti

1. Biodata narasumber yang diwawancarai (latar belakang, pendidikan, sejak kapan bekerja di Kedaulatan Rakyat, alasan bekerja disini, apakah ada pengalaman sebelumnya bekerja di media lain, pernah ikut organisasi lain sebelum bergabung ke KR)?
2. Sebelum fokus ke topik terkait kasus Aditjondro. Sebelumnya bisa diceritakan bagaimana posisi wartawan ketika melakukan rapat redaksi Kedaulatan Rakyat? Apakah semua wartawan wajib hadir? Bagaimana situasinya, bisa digambarkan?
3. Apakah anda sebagai wartawan pernah meliput berita yang terkait isu sensitif terhadap Keraton Yogyakarta sebelumnya?
4. Kemudian seberapa sering anda ditugaskan untuk meliput kasus terkait penghinaan yang dilakukan George Aditjondro? Menurut anda, mengapa anda diberikan kepercayaan meliput dan menulis berita terkait kasus sensitif seperti ini?
5. Bagaimana proses anda ketika melakukan peliputan berita terkait kasus ini, apa peristiwa/kejadian atau narasumber yang jadi fokus pencarian?
6. Apa yang biasa anda lakukan sebagai wartawan untuk mendapatkan berita yang mendalam selama masa peliputan? Bagaimana anda mencari tahu pihak-pihak mana saja yang terlibat dan bagaimana usaha anda untuk agar mereka mau diwawancarai?
7. Dalam proses penulisan berita, selain 5w+1h, apa lagi yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan fakta dan pengemasan artikel berita? Apakah ada pesan dari redaksi untuk membentuk suatu *frame* tertentu pada saat penulisan berita?
8. Bagaimana menentukan narasumber yang dipilih untuk tiap artikel pemberitaan? Apakah berdasarkan hasil rapat redaksi atau perintah dari atasan (redaktur pelaksana) misalnya?

9. Untuk kemudian berita itu layak menjadi *headline* atau tidak, berdasarkan keputusan wartawan atau kebijakan redaksi? Bagaimana pemilihan judul atau pemilihan *lead* berita, apa yang menjadi kriterianya? (apakah menjadi otoritas wartawan sepenuhnya)?
10. Apakah ada rutinitas dalam Kedaulatan Rakyat yang mempengaruhi anda sebagai wartawan dalam membuat berita? Misalnya terkait *pakem*? Mungkin juga hal yang tidak boleh dan dibolehkan dalam pemilihan narasumber atau pemilihan fakta? Terlebih ini kan terkait isu sensitif terhadap Keraton Yogyakarta? Mempengaruhi ideologi dan kekritisannya dalam menulis berita?
11. Apa ada kendala dalam proses peliputan terkait *follow-up* pemberitaan terkait kasus Aditjondro?
12. Berdasarkan pemberitaan seputar kasus George Aditjondro selama periode Desember 2011, sebenarnya *frame* seperti apa yang ingin dibentuk Kedaulatan Rakyat terhadap Aditjondro? (mungkin ini terkait rapat redaksi sebelumnya) Apa yang mendasari *frame* tersebut?
13. Lalu apakah bagaimana posisi Kedaulatan Rakyat dalam melihat kasus Aditjondro yang menghina Keraton Yogyakarta? Netral atau berpihak? Alasannya?
14. Dari analisis saya melalui beberapa artikel berita utama, saya melihat Kedaulatan Rakyat cenderung memosisikan George Aditjondro ke arah negatif. Apakah ada hubungan yang tidak baik antara Kedaulatan Rakyat terhadap Aditjondro?
15. Bagaimana pendapat anda sebagai wartawan terkait kasus penghinaan yang dilakukan Aditjondro terhadap Keraton Yogyakarta (Mulai dari awal munculnya pernyataan kontroversial George hingga penanganan kasusnya di ranah hukum dan aksi protes dari masyarakat)?

16. Di suatu artikel, saya melihat KR seolah mengarah kepada asumsi bahwa ada motif/kepentingan lain/pihak yang mendukung pernyataan Aditjondro. Menurut anda, apakah George adalah aktor tunggal di balik kasus ini?
17. Kemudian, dari pengamatan dan analisis saya, mengapa hampir sebagian besar artikel pemberitaan terkait Aditjondro, memberikan porsi yang sedikit terhadap pernyataan atau mungkin pembelaan dari George Aditjondro terkait kasus ini? (terkesan tidak *cover both sides*) Atau memang anda kesulitan untuk menemui Aditjondro untuk meminta pendapatnya?
18. Menurut anda, apakah artikel yang anda tulis telah mempengaruhi pembaca, dari mana ukuran atau patokannya?

Transkrip Wawancara dengan Hudono (Redaktur Pelaksana Kedaulatan Rakyat)

Pewawancara: Tesa Oktiana S

Tanggal: Kamis, 13 September 2012

Pukul: 15.00 WIB

Tesa	Sebagai redaktur pelaksana, sudah berapa lama bapak bekerja di Kedaulatan Rakyat?
Hudono	Kalau di KR sudah sejak 1994 ya. Dimulai dengan menjadi wartawan dulu, kemudian setelah saya di <i>rolling</i> untuk meliput ke berbagai daerah, sampai akhirnya posisi saya berada pada redaktur pelaksana sekamir 3 tahun lalu.
Tesa	Sebelum merujuk ke topik penelitian, terlebih dahulu saya ingin mengetahui sistem kerja dan prosedur di Kedaulatan Rakyat?
Hudono	Kira-kira pada prinsipnya sama ya, tidak jauh beda dengan koran-koran atau media lainnya. Kami sebelum menurunkan tulisan misalnya ya, kami kan harus betul-betul melakukan seleksi yang cukup ketat, mulai dari pencarian berita dari wartawan. Kemudian disampaikan wartawan ke <i>desk</i> halaman, lalu di situ ada proses <i>editing</i> . Dan redaktur akan mempertimbangkan layak tidaknya pemuatannya, setelah itu oke. Kemudian ditentukan mana yang menjadi unggulan untuk <i>headline</i> -nya. Setelah semua halaman sudah ditentukan mana berita yang layak, maka akan ada proses <i>finishing</i> . Selaku redaktur pelaksana saya juga akan mengawasi dan mengkoscek apakah berita-berita tersebut sudah layak atau tidak. Bisa jadi ketika yang lain bilang sudah layak, namun saya bisa saja menyuruh untuk mengkoscek dan melengkapi data lagi agar bisa <i>fit to print</i> . Maka wartawan yang menulis pun dipanggil untuk memperbaiki tulisannya. Menurut saya, kelengkapan data itu penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, lebih penting lagi untuk menjaga tampilan KR itu tetep bagus gitu ya, tetep berbobot dan betul-betul diperhitungkan serta mencerdaskan masyarakat, maka kami selalu melakukan rapat redaksi atau <i>meeting</i> ya setiap hari. Memang ada pembagian divisi-divisi ketika wartawan yang ada di kota semua harus bertemu pada malam hari untuk rapat, kira-kira apa yang harus diliput untuk esok hari. Kemudian untuk liputan incidental seperti kecelakaan kan tidak bisa direncanakan, jadi kami langsung turun ke lapangan saja. Dan pada malam hari pun kami melakukan rapat pimpinan redaksi untuk menentukan tampilan dalam etalase atau halaman luar. Sebab dalam pertama itu penting bagi sebuah media cetak, terlebih <i>headline</i> -nya.
Tesa	Betul pak, saya sebagai khalayak yang membaca berita pun selalu lebih dulu melihat <i>headline</i> dibanding artikel berita yang lain.
Hudono	Oh iya, setiap hari senin dan kamis, seluruh dewan redaksi berkumpul untuk rapat koordinasi melihat mana yang kurang. Berarti proses untuk menurunkan tulisan atau

	berita itu memang tidak bisa <i>ujug-ujug</i> istilah jawanya ya. Namun memang ada mekanisme yang cukup ketat begitu ya.
Tesa	Terus untuk penggelontoran isu, biasanya suatu media mempunyai isu-isu tertentu yang akan diangkat untuk terbitan harian beritanya. Lalu untuk KR sendiri seperti apa penentuan isu yang akan diangkat?
Hudono	Untuk masalah penentuan isu itu ya, semua wartawan pasti membawa isu masing-masing. Cuma kan harus selektif, mana dari isu-isu tersebut yang sedang berkembang, mana kepentingan publiknya paling tinggi. Ya menggunakan teori yang anda pelajari, apa itu.....
Tesa	Oh terkait nilai berita ya pak
Hudono	Ya betul. Nilai berita itu memang kami pertimbangkan betul, dan yang terakhir yang dipertimbangkan itu ya kelayakan, kepatutan. Apakah ini kami anggap patut atau tidak. Itu sangat perlu untuk diperhatikan. Untuk itu semua memang perlu kami diskusikan, terlebih ketika kami ingin mengangkat di halaman pertama begitu ya. Sehingga berita yang diangkat betul-betul berbobot dan tidak hanya sekedar bombastis semata. Kami tidak akan main-main dengan itu. Dari awal komitmen KR kan sudah jelas, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, kepentingan publik dan mencerdaskan. Saya kira itu. . .
Tesa	Apakah ada aturan tertentu yang menjadi <i>pakem</i> atau kebijakan redaksional? Misalnya wartawan tidak boleh begini atau begitu. . . .
Hudono	Itu tentu saja ada ya. Secara periodik, kami melakukan semacam <i>in house training</i> lah. Jadi wartawan juga redaktur terus diingatkan bahwa KR itu beda dengan yang lain. Misalnya ya dengan filosofi Jawa yang sangat terkenal, <i>ngono yo ngono mung ojo ngono</i> . Sederhana memang, tapi dijunjung betul sama KR. Diibaratkan, kami menghantam orang tidak harus selalu frontal, tidak harus sampai orang itu mati juga. Dalam hal mengkritik pun, tidak usah terlalu lah. Saya yakin orang yang dikritik itu sudah merasa atau malu istilahnya. Jadi KR merasa tidak perlu terlalu frontal, toh disentil aja udah merasa kok. Dan kami sadar hidup di masyarakat Jawa, kultur Jawa. Jadi ada <i>unggah ungguh</i> yang harus kami perhatikan termasuk dalam membuat pemberitaan.
Tesa	Jadi kultur lekat sekali ya pak dalam kinerja redaksi Kedaulatan Rakyat?
Hudono	Ya betul, makanya saya merasa ini yang menjadi pembeda KR dengan media lain. Jadi menurut kami, jangan terburu-buru untuk <i>men-judge</i> . Toh proses terpenting dari dunia jurnalisme kan verifikasi.
Tesa	Pak, biasanya dalam suatu media kan ada banyak kepentingan yang mempengaruhi. Sebut saja pengiklan, atau mungkin kelompok penekan dan juga pemerintah, terlebih KR hidup di Jogja, pasti berkaitan dengan Keraton Yogyakarta. Nah sebenarnya bagaimana pengaruh pihak-pihak ini terhadap kinerja redaksi KR?
Hudono	Saya juga sering mengingatkan bahwa kami menghormati institusi Keraton, bukan berarti bahwa kami kehilangan sikap kritis. Bahkan Sultan sendiri ngomong,

	<p>silahkan kritik pemerintah daerah dan Keraton. Itu artinya memberi ruang kepada masyarakat khususnya pers untuk melakukan kontrol begitu. Hal ini berkaitan dengan fungsi pers, salah satunya kontrol sosial dan menjadi <i>watch dog</i> istilahnya. Dan kami lakukan betul ya ketika misalnya disahkan RUUK DIY, maka mau tidak mau konsekuensinya, Keraton harus melakukan reformasi yang selama ini mungkin tabu kan. Masyarakat Jogja kan pasti mikirnya reformasi itu sesuatu yang mengerikan toh?! Tapi nyatanya Sultan sendiri mengakui bahwa kami harus siap melakukan itu, bahkan nanti akan di-<i>publish</i>. Itu artinya semua aturan yang berlaku di Keraton akan disampaikan kepada publik. Ini artinya ada perubahan bahwa paradigma yang mengatakan Keraton sakral. Jadi media pun selain melakukan kritik pun seharusnya juga mengawal proses reformasi yang akan dilakukan Keraton.</p>
Tesa	Jadi Keraton sendiri tidak mengekang atau menekan kebebasan pers begitu ya pak?
Hudono	Iya betul mbak. Justru kami malah senang ya bahwa tidak ada pertentangan gagasan di Keraton. Dan saya merasa Keraton pun sudah memahami porsi media untuk melakukan kritik dan sebagainya.
Tesa	Lalu untuk unsur lain yang mempengaruhi pak, misalnya pengiklan atau pemerintah terlebih masyarakat bagaimana pengaruhnya terhadap media?
Hudono	Baik pengiklan maupun pemerintah itu sekarang seolah berlomba mempengaruhi pers, iya toh mbak?! Bahwa pers independen itu kan sudah kodratnya atau fitrahnya. Cuma independensi pers itu tidak dipahami secara jernih oleh pemerintah atau pemasang iklan. Taunya mereka, kalau itu tidak menguntungkan bagi mereka misalnya pemerintah, itu artinya pers posisinya tidak benar. Pers juga tidak menguntungkan bagi pengiklan, itu pun akan merusak kepercayaan si pengiklan. Lalu bagaimana kami sebagai pers mengatasi hal-hal yang demikian, tentu kami tetap profesional. Ketika ada tekanan dari pemerintah, ada intervensi dari pemerintah, kami berusaha melawan dong, kami mempertahankan integritas kami. Kalau ada protes dari pengiklan, ya tetap kami memberikan penjelasan tidak langsung menuruti apa yang menjadi keinginan mereka, karena ini terkait dengan kepentingan masyarakat juga.
Tesa	Memberikan penjelasannya dalam bentuk apa pak kepada pengiklan? Bisa diberikan contohnya?
Hudono	Dulu itu ya mbak, ketika ada sebuah supermarket besar yang kebakaran. Ternyata supermarket tersebut memasang iklan di KR, dan mereka meminta untuk tidak diliput kejadian kebakaran tersebut. Tentu saja tidak bisa, pers harus melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. KR menulis tentang kebakaran supermarket tersebut, namun kami juga bersikap <i>fair</i> untuk memberikan kesempatan kepada <i>carefour</i> untuk memberikan jawaban untuk menjelaskan penyebab kebakaran. Jadi sebenarnya, kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab rasa penasaran masyarakat. Setidaknya melalui apa yang kami tulis, mereka bisa kembali memperbaiki nama baik perusahaannya.

Tesa	Tetapi ya tetap ada tarik menarik kepentingan toh pak?
Hudono	Ya kalau tarik menarik kepentingan sampai sekarang masih kami rasakan mbak. Termasuk dengan keberadaan pemodal, itu pasti ya. Bahwa itu sebuah keniscayaan menurut saya bahwa pemodal atau pemilik media itu ingin melakukan intervensi, tentu saja iya. Namun disitulah ujian kita, khususnya untuk redaksi dalam mempertahankan idealisme bahkan independensi. Sampai tercapai titik temu dimana semua pihak bisa menerima. Saya kira begitu.
Tesa	Sekarang kita bergerak ke kasusnya Aditjondro ya pak, terkait pemberitaannya. Ketika muncul pernyataannya Aditjondro, bagaimana KR melihat kasus ini dan apakah ada semacam <i>mapping</i> atau pemetaan dalam mem- <i>follow up</i> kasus tersebut selanjutnya?
Hudono	Oh tentu saja iya mbak. Bahwa apa yang dikatakan Aditjondro, dalam fenomena pers adalah sebuah peristiwa baru. Aditjondro sendiri dilahirkan bukan dalam kultur Jogja, bukan dalam kultur jawa lah begitu. Sehingga <i>statement</i> -nya ini sesungguhnya, kalau kita melihat secara <i>guyon</i> mungkin masih bisa dimaklumi. Namun dalam konteks, kebudayaan kultur Jawa, pernyataannya tersebut tidak bisa dianggap main-main dan sangat sensitif. Dan George itu seharusnya paham benar bahwa Keraton itu adalah simbol yang sangat dihormati masyarakat Jogja, bahkan masyarakat Jawa. Sehingga apapun yang terkait dengan Keraton, yang bernada negatif atau miring dan diungkapkan dalam forum <i>ketawa ketawa</i> gitu ya sungguh tidak bisa diterima masyarakat Jogja. Dalam kaitan itu, bagaimana pers mengambil peran, apakah KR meng- <i>cover</i> apa adanya? Saya kira begini, pers itu tetap punya <i>frame</i> . Makanya kami tetap mem- <i>follow up</i> apapun terkait kelanjutan kasus Aditjondro dalam perspektif budaya Jawa, dalam perspektif eksistensi Keraton yang terusik dan dalam perspektif hukum. Jadi komprehesif. Apakah pernyataan dari Aditjondro itu bisa dikualifikasikan sebagai pencemaran atau penghinaan, sebenarnya itu kan masih bersifat subjektif ya. Sebab pasal yang mengenai pencemaran atau penghinaan memang ada interpretasi yang tidak bisa disamakan. Selain itu, ada perspektif dari aspek budaya. Dan lebih penting lagi, bahwa kasus ini menjadi pembelajaran untuk kedepannya, siapapun berhati-hatilah untuk mengomentari soal Keraton atau soal masyarakat Yogyakarta atau budaya, dsb.
Tesa	Berarti setelah isu itu muncul, langsung menjadi agenda khusus di redaksi KR untuk terus mem- <i>follow up</i> kasus Aditjondro. . . termasuk protes masyarakat atau. . .
Hudono	Bener mbak. Ya termasuk pembelaan dari Aditjondro sendiri. Kami tahu bahwa sebenarnya Sultan HB X itu mau memaafkan lah, cuman kan kalau dilihat dari perspektif media ya Sultan seolah menunjukkan tidak segampang itu untuk memberikan maaf. Sampai saat ini Aditjondro sendiri sempet sakit-sakitan, mungkin karena memikirkan masalah ini. Ya secara kemanusiaan, media ya kasian juga. Tapi secara masyarakat sudah terlanjur sakit, ya itulah harga yang harus dibayar oleh Aditjondro. Bahkan harga itu belum cukup, jadi dengan diusir pun belum cukup.

	Makanya masyarakat juga memperkarakan kasus ini ke ranah hukum.
Tesa	Lalu pak untuk isu sensitif seperti ini, apakah ada wartawan khusus yang ditugaskan untuk meliput dan mem- <i>follow up</i> kasus ini. Apakah ada kriteria tertentu dalam pemilihan wartawan? Misalnya terkait spesialisasi wartawan yang sering meliput berita politik, sosial budaya, atau hukum. . . .
Hudono	Ya kami memang butuh wartawan yang sensitif untuk meliput kasus sensitif seperti ini. Ketika persoalannya memasuki ranah hukum, dimana Polda menerima laporan warga yang tersinggung atas pernyataan Aditjondro. Kami menurunkan wartawan yang sudah cukup lama berkecimpung di bagian kriminal. Sehingga wartawan tersebut akan paham betul apa yang akan dituliskannya. Kemudian ketika Sultan berkomentar dan menanggapi apa yang dilakukan Aditjondro, maka kami memilih wartawan yang biasa meliput seputar Keraton. Jadi tulisan perpaduan dua wartawan tadi setidaknya bisa merepresentasikan yang terjadi sesungguhnya di masyarakat kita. Begitu. Menurut saya juga, spesialisasi wartawan itu penting, karena itu akan mempengaruhi warna penulisan berita.
Tesa	Kemudian untuk pemilihan narasumber sendiri, apakah diserahkan sepenuhnya kepada wartawan atau sesuai dengan keputusan rapat redaksi?
Hudono	Biasanya kami tawarkan, tapi sebelumnya kami bertanya dulu kepada wartawan siapa narasumber yang sudah dipilih. Karena begini, jurnalis kadang punya penyakit yang merasa sok pinter, malah berujung memilih narasumber yang tidak kompeten. Memang semua warga negara berhak untuk berbicara, namun yang menjadi persoalan apakah orang tersebut kompeten atau tidak untuk berkomentar di pemberitaan. Jadi ketika narasumber sudah tepat, maka wartawan akan diberikan ijin untuk terus jalan. Tapi kalau tidak tepat, kami tetap memberikan masukan dan pilihan narasumber.
Tesa	Kembali lagi ke pemberitaan seputar Aditjondro nih pak. Bagaimana sih penentuan judul, apakah berita ini cocok atau tidak dijadikan <i>headline</i> ?
Hudono	Saya kira kami tidak boleh main-main dalam penentuan <i>headline</i> . Yang pertama KR melihat ada gak sih kepentingan publiknya atau manfaatnya ke masyarakat. Kami juga melihat kasus tersebut nilai konfliknya cukup tinggi, artinya itu menjadi masyarakat juga. Kemudian dampak juga kami perhitungkan. Hal-hal yang selama ini mungkin dalam kajian teoritis tidak pernah terungkap, dalam prakteknya harus dipertimbangkan betul. Karena kita menghadapi dunia nyata kan bukan dunia gaib begitu. Tahu-tahu KR dituntut bagaimana? Coba anda lihat KR seminggu lalu, ada koran atau media cetak yang digeruduk kalau tidak salah Jawa Pos, yang menampilkan Pakualam dan Angling bertelanjang dada. Dan ini menjadi protes dari masyarakat karena dianggap tidak sopan. Nah, kami tidak ingin mengalami seperti itu, jadi kami memilah mana yang patut ditampilkan, mana yang tidak. Bahwa semua fakta adalah apa yang terjadi dan disaksikan oleh masyarakat, tetapi apa yang mau di- <i>publish</i> itu ada filternya, patut atau tidak. Jadi ketika tulisan itu turun cetak,

	<p>pertanyaan terakhirnya adalah ini patut atau tidak, pantas atau tidak dipublikasikan meskipun fakta. Dan terkait dengan soal Aditjondro, kami memang beberapa kali menurunkan kasus Aditjondro sebagai <i>headline</i> ya, tapi ya setelah itu <i>nggak</i>. Itu artinya tingkat kepentingannya menurun, sehingga tidak kita tampilkan di <i>headline</i> begitu. . .</p>
Tesa	<p>Apa mungkin karena pengaruh peristiwa lain yang sedang <i>booming</i> di periode Desember 2011, ada kasus korupsi Wisma Atlet lalu ada kasus sengketa lahan di Bima? Jadi perhatian KR terhadap Aditjondro sempat beralih begitu?</p>
Hudono	<p>Saya kira <i>nggak</i>, karena bagaimanapun berita-berita lokal tetap menjadi perhatian utama kami mbak. Nah, kasus Aditjondro kan masuk ranah lokal namun menjadi isu nasional juga. Dan inget KR itu koran lokal, sehingga kalau kami fokus ke isu nasional juga, wah sudah dibantai isunya oleh koran nasional. Jadi kami lebih fokus melihat sisi kelokalan yang tidak dimiliki media nasional. Ini sekedar informasi saja ya mbak, SBY itu setiap hari jug abaca KR, di mejanya itu sudah dipastikan ada KR loh mbak.</p>
Tesa	<p>Jadi bisa ditekankan isu lokal menjadi lebih penting dibandingkan isu nasional bagi Kedaulatan Rakyat begitu ya pak?</p>
Hudono	<p>Ya karena itu langsung menyentuh kebutuhan masyarakat DIY, tetapi bukan berarti juga kami tidak mengangkat nasional sama sekali. Tetap kami angkat. Kalau isunya memiliki nilai yang universal dan menyentuh kebutuhan masyarakat Yogyakarta, misalnya kenaikan harga BBM. Itu kan dari pusat toh isu dan pengambilan kebijakannya mbak, bukan dari Jogja yang menentukan harga BBM. Namun kami tetap menjadikan berita itu sebagai <i>headline</i>, karena imbasnya sampai ke masyarakat Jogja. Gitu loh. . .</p>
Tesa	<p>Tapi tetap saja porsi untuk lokal lebih banyak dibandingkan porsi untuk isu nasional, begitu ya pak. Nah, pak terkait dengan pantas atau tidaknya kenaikan suatu berita menjadi <i>headline</i>. Sebenarnya ukurannya dari perspektif masyarakat atau Kedaulatan Rakyat itu sendiri pak?</p>
Hudono	<p>Ya media harus punya ukuran, yang pertama itu dari aspek hukumnya. Kalau hukum pasti menuntut kepastian dan kebenaran. Yang kedua itu etika. Nah, bahwa media itu dibatasi rambu-rambu etika, etika moral. Ya lebih tepatnya kode etik jurnalistik. Yang diterapkan dewan pers dan ditetapkan oleh PWI, dan kebetulan saja wartawan KR semuanya anggota PWI. Nah, yang ketiga ini terkait dengan yang anda singgung seputar masyarakat. Ya masyarakat itu tidak boleh diabaikan, artinya apa ada nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat Yogyakarta yang dipelihara dan hidup di tengah-tengah mereka, itu juga menjadi ukuran bagi kita untuk menentukan layak atau tidaknya suatu berita. Nah ini yang mungkin oleh media lain tidak dihiraukan, tetapi kami sangat menjunjung. Karena apa, karena KR hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dan menjunjung budaya Jogja.</p>
Tesa	<p>Pak terkait kasus yang sensitif seputar Aditjondro, kita bisa melihat masyarakat</p>

	menaruh amarah yang besar terhadap pernyataan George Aditjondro. Lalu dari redaksi KR sendiri menyosokan atau mencitrakat George seperti apa pak?
Hudono	Emmm. . .George itu sebenarnya bukan orang baru ya. Saya tuh tahu latar belakang George Aditjondro. Sebelum menanggapi pertanyaan anda, saya ceritakan <i>background</i> -nya dulu ya. George itu ketika jamannya Pak Harto, dia pernah berbicara di seminar UII, tahunnya saya lupa, namun peristiwanya saya ingat dia berpendapat tentang pembatasan kekuasaan presiden. Dan itu bukan ide baru, karena hal itu sudah pernah dicetuskan oleh Amin Rais. Tetapi rezim Suharto yang punya kekuasaan termasuk di kepolisian daerah, langsung menangkan George dan membubarkan seminar tersebut. Artinya diskusi tersebut dianggap tidak sah dan sebagainya dan dianggap <i>merongrong</i> pemerintah. Maka pembicaraanya diproses ke ranah hukum. Aditjondro waktu itu diproses hukum di Poltabes Jogja. Saya waktu itu meliput tentang tuntutan terhadap George yang dituduh <i>merongrong</i> kekuasaan presiden terkait pasal penghinaan terhadap kepala negara. Nah waktu itu, pemberitaannya sempat heboh sekali di Yogyakarta. Setelah kekuasaan Pak Harto runtuh, kemudian George lari ke Australia, dia malah mengajar di sana. Dan sempat wartawan meminta bantuan Interpol, namun nyatanya tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Australia. Dan akhirnya Aditjondro pulang ke Indonesia, kasus tersebut tidak dilanjutkan dan adem ayem saja. Seolah kasusnya dianggap selesai begitu mbak. Nah dari situ, saya sebenarnya sudah bisa menilai bahwa George itu pembawannya seperti itu. Bahwa dia akan melawan kekuasaan, termasuk SBY dengan menerbitkan buku Gurita Cikeas. Padahal kalau dilihat, buku itu cuman kompilasi dari tulisan-tulisan yang diterbitkan media. Makanya saya heran juga kenapa SBY kebakaran jenggot terkait buku tersebut. Dari <i>background</i> yang seperti itu, saya tidak terkejut bahwa kemudian Aditjondro bikin onar di Jogja dan membuat pernyataan Keraton, Kera yang ditonton. Tapi dia lupa bahwa dia hidup di Jogja dan yang dia serang itu Keraton. Berani menyerang Keraton, maka yang membela adalah seluruh masyarakat Yogyakarta. Gitu loh. .
Tesa	Berarti dengan kata lain, bapak ingin bilang bahwa Aditjondro adalah sosok yang sering membuat onar, seperti itu?
Hudono	Ya lebih tepatnya mungkin kontroversial ya mbak. Dia memang menggugat tentang keamanan, tapi George juga harus sadar diri, dia hidup dimana. Dia harus menyesuaikan dengan budaya atau kultur dimana dia berpijak. Begitu maksud saya.
Tesa	Jadi pak, saya melihat dari artikel pemberitaan yang sudah diteliti, bahwa KR itu seolah menggambarkan bahwa ada aktor lain atau motif lain disamping pernyataannya George. Menurut bapak, George itu aktor tunggal atau ada pihak lain yang membencengnya untuk mengganggu stabilitas Keraton Yogyakarta?
Hudono	Saya kira kalau pernyataan itu diboncengi pihak lain, pasti George akan merasa murahan kalau dia dikontrol dalam mengeluarkan pernyataannya. Karena George sendiri secara personal sudah memiliki nilai berita. Sebab George sendiri sudah

	dikenal sebagai sosok kontroversial.
Tesa	Berarti bisa ditekankan bahwa KR sebenarnya menilai tidak ada pihak lain yang memboncengi George dalam mengeluarkan pernyataan tersebut?
Hudono	Sebenarnya ya mbak, KR tidak menafikan adanya pihak lain. Namun sejauh ini, belum ada indikasi ke arah itu. Bahwa ada penyandang dana itu mungkin saja. Karena apa, George itu kan memiliki jaringan yang sangat luas. Tetapi untuk ide mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut, saya rasa dari kecerdasan Aditjondro dalam mengkritisi, namun disayangkan tidak pada tempatnya. Tetapi kalau secara finansial, dia memiliki penyandang dana. Itu saya sangat percaya. Bahwa kemudian Aditjondro dimanfaatkan, mungkin iya. Misalnya untuk memperkeruh situasi Keraton Yogyakarta. Dalam hal ini, saya melihat pasti ada pihak yang diuntungkan dari pernyataan George Aditjondro. Jadi misalnya ada orang yang tidak menyukai Keraton, nah pasti pihak tersebut akan menemukan momentumnya dari pernyataan Aditjondro itu.
Tesa	Nah begini pak, kan kita tahu ada teori <i>bad news is a good news</i> . Tetapi di Kedaulatan Rakyat sebagai media cetak, apakah memberlakukan perspektif tersebut di dalam mengemas pemberitaan?
Hudono	Saya kira KR tidak sepeti itu ya mbak. Walaupun saya melihat media-media lain menerapkan perspektif tersebut. Karena KR sendiri merasa perspektif tersebut tidak cocok sesuai falsafah yang kami pegang teguh. Bahwa dalam melakukan pemberitaan, sesuatu yang baik atau positif pun menarik untuk diberitakan. Misalnya saja, bahwa rakyat Papua sudah bisa mengakses hasil tambang. Itu kan tetap menarik perhatian khalayak mbak. Kalau pemberitaan negatif yang terus dimuat KR, saya yakin khalayak pasti muak mbak. Hehe Dan masih banyak aspek lain yang perlu diperhatikan dibanding melihat <i>bad news is a good news</i> .
Tesa	Sesuai dengan hasil analisis teks berita yang saya lakukan sebelumnya ya pak, saya melihat KR dalam memberitakan kasus Aditjondro, lebih banyak memberikan porsi pendapat kepada FMY (masyarakat yang kontra), polisi dan praktisi hukum juga. Tetapi kenapa tidak menyoroti masyarakat yang kemungkinan pro atau dalam posisi netral dalam menanggapi pernyataan Aditjondro?
Hudono	Menurut saya ya, mereka nampaknya juga mencari aman. Kami disini tidak menutup kesempatan kepada siapa saja untuk berbicara. Orang yang membela Aditjondro, ya kita akomodir. Namun, sejauh ini kami melihat tidak ada orang yang berani membela, kecuali pengacaranya. Mengapa gak berani? Karena masyarakat itu kan dalam posisi marah ya, kalau ada orang lain yang membela si George secara terang-terangan bisa ikut dihabisi mbak, mungkin rumahnya ikut dibakar. Kami juga memahami kondisi yang demikian ya, kami tidak mau memperkeruh suasana. KR itu mendorong bagaimana konflik ini selesai. <i>Piye carane</i> agar Aditjondro <i>action</i> untuk buka suara untuk menjelaskan maksud pernyataannya. Dan akhirnya Aditjondro mengungkapkan permintaan maafnya kan. Sultan pun sebenarnya sudah memaafkan loh. Itu luar biasa. Itu sebenarnya solusi dimana pers bisa mengambil peran untuk membaikkan dua pihak yang sedang berkonflik. Itulah peran pers, jadi

	tidak hanya sekedar merekam kejadian, tapi bagaimana agar solusi dama bisa tercapai.
Tesa	Menurut pengamatan bapak sendiri sebenarnya ada pihak yang membela atau netral terhadap Aditjondro, cuman tidak berani untuk bersuara. Begitu ya pak?
Hudono	Bener mbak. Jadi ya sebenarnya kami berusaha mendorong adanya usaha perdamaian dan penyelesaian masalah ini. Terlebih kami mendorong Aditjondro untuk bersuara dan keluar dari persembunyiannya. Setelah Aditjondro keluar dan meminta maaf, kami malah sempat bersimpati dengan beliau. Sebab dia terus mencari Sultan HB X sehari-hari, tetapi tidak ketemu. Bukan Sultan tidak ada, ya mungkin ada keengganan dari Sultan untuk bertemu langsung dengan George.
Tesa	Ketika berita kontroversial George diturunkan, memang benar ya pak wartawan sendiri kesulitan untuk menemui Aditjondro?
Hudono	Ya bener mbak, George itu ternyata mengungsi. Karena dia tidak nyaman ya, terlebih melihat pemberitaan terutama dari KR yang cukup mem- <i>blow up</i> , tampaknya dia ketakutan. Dan memang dia diusir juga dari kediamannya mbak. Ya ini juga memprihatinkan sih mbak.
Tesa	Jadi setiap penurunan artikel berita terkait kasus George sebelum akhirnya beliau bersuara, wartawan KR terus mencari George untuk mendapatkan tanggapannya?
Hudono	Oh iya mbak. Kami berusaha <i>fair</i> , walaupun pada saat itu kondisinya sedang panas ya. KR itu ingin menjadi jembatan aspirasi. Ketika Sultan memberikan kesempatan kepada George, kami berusaha memberi tahu George untuk segera menemui Sultan. Begitu juga ketika George menyampaikan niatnya untuk bertemu Sultan dan minta maaf, kami juga menyampaikan kepada Sultan.
Tesa	Tapi pak, selama pemberitaan terkait kasus Aditjondro diturunkan di periode Desember 2011, apakah ada <i>complain</i> pak terkait bentuk pemberitaannya?
Hudono	Seingat saya sih nggak ada mbak. Bahkan dari pihak George pun tidak ada <i>complain</i> mbak. Kami rasa dia sendiri sudah menerima bahwa dirinya memang bersalah.
Tesa	Berarti pak, kalau boleh saya menekankan disini, hubungan KR terhadap George sendiri bisa dibilang netral atau bagaimana pak?
Hudono	Saya rasa netral mbak. Sebab kami merasa tidak ada masalah. Cuman ya sekarang ini kami melihat George itu seperti menghilang ditelan bumi. Kemarin saya dapat informasi kalau dia itu sempat sakit, cuman tidak ada yang tahu. Dan sempet saya mendengar tanggapan masyarakat Jawa yang bilang George itu kwalat akibat menghina Keraton Yogyakarta.
Tesa	Secara pribadi, sebagai redaktur pelaksana, bagaimana bapak menanggapi kasus Aditjondro, terlebih melihat reaksi masyarakat dan kelanjutan kasus ini di bidang hukum?
Hudono	Ya saya sih tetap mencoba profesional mbak, bahwa masyarakat itu bisa memahami pemberitaan KR karena selama ini bisa mewakili dan merepresentasikan suara rakyat. Ketika George menyerang Keraton, yang sakit tuh bukan Sultan saja, tetapi masyarakat Jogja yang mungkin tidak pernah berinteraksi dengan Sultan dan berinteraksi dengan George. Dengan pemberitaan itu mereka cukup terpuaskan, ya secara psikologis begitu ya. Sehingga mereka sama sekali tidak melakukan <i>complain</i> terhadap KR, bahkan mendukung atau mendorong untuk terus mempublikasikan itu. Dan saya melihat hal ini sehatlah dalam kehidupan demokrasi, terutama di Jogja. Kami kan juga mendorong demokrasi berkembang di Jogja, bahkan di Keraton

	sendiri itu juga harus dikembangkan demokrasi dong. Kalau perlu diubah pakem-pakemnya, kalau disetujui pihak-pihak Keraton ya. Dan saya melihat Keraton ini pun sudah mulai membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan masukan.
Tesa	Kapan atau lebih tepatnya KR mulai untuk tidak mengekspos kasus Aditjondro?
Hudono	Ketika kasusnya tidak menarik lagi, persoalannya sudah cukup. Dan masyarakat sudah mendapatkan informasi, ya sudah kami selesai dan mengganti dengan topik lain.
Tesa	Walaupun kasusnya sempat menggantung ya pak di Desember 2011?
Hudono	Ya karena itu sudah terkait proses hukum toh mbak. Kalau proses hukum kan tidak bisa sehari dua hari, ya secara hukum memang menggantung. Jadi secara hukum, kasus George ini belum selesai, karena prosesnya masih berlanjut. Tapi misalnya setelah sekian lama berakhir dengan George ditahan, pasti tetap kami beritakan kok. Dilihat dari sisi sosial, saya kasus ini sudah selesai, kelihatannya masyarakat sudah mulai lupa lah. Tapi sekedar informasi, kasus George ini sampai sekarang masih bergulir di meja hukum mbak. Dan kami melihatnya, tidak ada kemajuan penyelidikan dari aparat penyidik. Lagipula pers tidak bisa mengambil alih untuk menyelesaikan persoalan secara hukum, karena itu wewenang dari insitusi hukum.
Tesa	Pak, KR kan lebih dekat hubungannya dengan kepolisian, maksud saya lebih sering berinteraksi, menurut media sendiri apa sih yang menyebabkan kasus ini terkesan terulur lama?
Hudono	Saya kira ya jawabannya klasik sih mbak. Dalam kasus ini kuncinya memang di kepolisian, kalau kepolisian tidak bergerak, ya tetap stagnan saja kasusnya. Kami sempat mendorong pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini, namun kepolisian tetap meminta untuk menunggu dan bersabar. Ya walaupun misalnya kasus ini diselesaikan secara damai, harusnya ada <i>publish</i> ya biar, masyarakat tahu bagaimana penyelesaian kasus ini.
Tesa	Baik pak Hudono terima kasih untuk waktunya sehingga saya bisa mendapatkan data yang saya perlukan.
Hudono	Ya sama-sama ya mbak

Transkrip Wawancara dengan Dwi Astuti (Wartawan Kedaulatan Rakyat)

Pewawancara: Tesa Oktiana S

Tanggal: Jum'at, 14 September 2012

Pukul: 17.00 WIB

Tesa	Mungkin sebelum ke topik, bisa diceritakan dulu mbak bagaimana akhirnya bisa terjun menjadi wartawan di Kedaulatan Rakyat?
Dwi Astuti	Dulu saya kan sekolahnya di jurusan jurnalistik, ilmu komunikasi di akademi komunikasi Yogyakarta. Jadi sebelum pendaratan itu, ada <i>recruitment</i> di KR, ya sudah saya coba dan ikut tes liputan dan bikin berita, dan akhirnya diterima. Saya bergabung dengan KR sejak 2004, jadi kira-kira sudah delapan tahun saya menjadi wartawan KR.
Tesa	Nah, kemarin kan saya sudah diberi gambaran dari Pak Hudono terkait proses rapat redaksi. Saya ingin tahu dari perspektif wartawan, bagaimana posisi wartawan di rapat redaksi? Mungkin bisa digambarkan juga situasinya.
Dwi Astuti	Ya yang jelas di rapat itu, wartawan mengajukan beberapa isu atau berita yang akan diliput. Selain wartawan sebagai penyumbang isu atau ide, juga sekaligus menerima penugasan dari redaksi, kadang juga mendapatkan evaluasi.
Tesa	Biasanya kalau di rapat redaksi, para pemimpin redaksi sudah memiliki isu yang akan digelontorkan, nah apakah wartawan memiliki kesempatan untuk mengkritisi?
Dwi Astuti	Itu pasti mbak, kami sebagai wartawan kadang turut mengkritisi. Tapi ya kembali lagi berita kan bersifat insidental, agak susah dirancang. Kadang apa yang terjadi di lapangan bisa terjadi sewaktu-waktu, jadi kami pun sering dalam posisi <i>standy by</i> . Seperti terkait peliputan Aditjondro, kami tidak bisa memprediksi secara detil juga kelanjutan kasusnya. Ya pokoknya di rapat sifatnya komunikasi dua arah kok mbak. Tidak melulu omongan pemimpin redaksi menjadi harga mati.
Tesa	Tapi kan pasti ada semacam pemetaan atau <i>follow up</i> terkait peliputan kasus Aditjondro ini kan mbak?
Dwi Astuti	Ya ada.
Tesa	Oh iya mbak di rapat redaksi itu, seluruh wartawan memang harus hadir atau bisa diwakili?
Dwi Astuti	Kalau rapat redaksi yang jadwalnya senin sama Kamis itu memang dihadiri redaktur. Kalau wartawan sih setiap hari sekitar jam setengah delapan mbak. Kami disitu menyusun program kerja dan isu atau peristiwa apa yang akan diliput atau <i>follow up</i> .
Tesa	Terkait dengan tugas dalam meliput kasus Aditjondro, apakah sebelumnya mbak dwi sudah pernah meliput kasus yang sensitif terkait Jogja atau Keraton misalnya?
Dwi Astuti	Oh iya, sebelumnya saya memang sering meliput kasus <i>bergenre</i> seperti ini. Kebetulan saya kan ditugaskan untuk meliput wilayah pemerintahan provinsi, dan biasanya sering <i>mengcover</i> berita di kantor gubernur atau pemerintahan dan juga Keraton Yogyakarta. Jadi saya sendiri sudah sering berhubungan dengan Keraton.

	Terlebih kasus Aditjondro ini ada kaitannya dengan Sultan, jadi wartawan yang ditugaskan yang sering berkecimpung untuk meliput Keraton begitu.
Tesa	Tadi mbak kan sudah bilang, kalau sering meliput berita sensitif misalnya seputar Keraton, nah menurut mbak apa yang membuat redaksi percaya untuk menugaskan mbak meliput berita terkait kasus Aditjondro menghina Keraton?
Dwi Astuti	Alasannya sih saya kurang tahu pasti ya. Mungkin karena pengaruh frekuensi saya sering berhubungan dengan Keraton dan mungkin juga karena saya sudah lama menjadi wartawan di KR. Saya merasa KR menugaskan wartawannya yang paham dan mengerti situasi peristiwa yang sedang diliput. Terutama untuk wawancara dengan Sultan ya mbak, kalau wartawannya jarang berhubungan langsung dengan Sultan, pasti akan kesulitan mencerna apa yang diungkapkan Sultan ke dalam suatu pemahaman. Jadi kata-kata Sultan itu kadang sulit dipahami dan kami perlu berhati-hati betul dalam “menerjemahkan”, agar tidak salah persepsi.
Tesa	Memang sejauh pengalaman mbak dalam meliput dan mewawancarai Sultan, pernah salah mempersepsikan pernyataan Sultan begitu?
Dwi Astuti	Sejauh ini sih untungnya tidak ya mbak, ya mungkin karena faktor frekuensi meliput Sultan, jadi saya belum pernah menemui masalah dalam menuangkan pernyataan Sultan ke dalam berita.
Tesa	Jadi sekarang kita fokus ke kasusnya Aditjondro ya mbak, ketika melakukan peliputan sebenarnya peristiwa atau kejadian dan siapa narasumber yang menjadi fokus dari wartawan sendiri?
Dwi Astuti	Kalau saya fokusnya langsung ke Sultan ya, karena kan pernyataan yang dikeluarkan George yaitu Keraton, kera yang ditonton itu kan langsung menyinggung Keraton Yogyakarta ya. Jadi saya ingin melihat tanggapan Sultan seperti apa, karena kan yang menjadi obyeknya Keraton ya dan Sultan posisinya sebagai raja. Baru kemudian saya melihat narasumber yang lain terkait kasus ini.
Tesa	Berarti tadi terkait pemilihan narasumber menjadi inisiatif dari mbak Dwi sendiri sebagai wartawan. Tapi apakah ada sumbangan atau suruhan dari redaksi untuk mewawancarai pihak tertentu?
Dwi Astuti	Ya pasti ada ya mbak, biasanya ketika tengah liputan, saya di-sms oleh redaktur untuk meliput pihak-pihak lain yang terkait gitu.
Tesa	Biasanya kan untuk meliput berita apalagi ini kasus sensitif, pastinya kan wartawan ingin menampilkan berita yang lebih mendalam. Nah, apakah mbak melakukan semacam <i>mapping</i> untuk menentukan poin-poin terkait data yang harus diperoleh atau malah spontanitas?
Dwi Astuti	Kalau harus nyusun skema itu kan sepertinya malah lama ya mbak. Biasanya kami membaca berita sebelumnya apa sehingga bisa menjadi acuan. Dan lebih sering spontan juga sih mbak. Waktu itu kan Aditjondro beberapa kali bolak balik ke Kepatihan ya untuk mencari maaf dari Aditjondro ya. Pas kebetulan kami <i>stand by</i> disana, langsung mewawancarai George. Kemudian esoknya beritanya langsung kami turunkan.
Tesa	Untuk proses penulisan berita, idealnya kan pasti yang diperhatikan 5w+1h, apa lagi aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengemasan berita?
Dwi Astuti	Ya secara umum sih untuk KR, menghindari hal-hal SARA yang bisa menimbulkan konflik. Dan juga harus berimbang. Terkait pemberitaan kasus Aditjondro sendiri, ketika kami mendapatkan tanggapan dari Sultan, kami berusaha

	untuk menghubungi Aditjondro. Agar informasi yang ditampilkan lebih berimbang.
Tesa	Terkait dengan narasumber, sebenarnya dari wartawan KR, apakah ada usaha untuk mencari pendapat masyarakat yang netral atau tidak kontral dengan pernyataan Aditjondro?
Dwi Astuti	Emmm . .kalau praktisi hukum kan juga bisa dikatakan pihak yang netral juga toh mbak. .
Tesa	Tetapi menurut pengamatan saya ya mbak, pernyataan dari praktisi hukum yang dikutip KR dalam artikel pemberitaan pun cenderung memojokan Aditjondro, misalnya mendiskreditkan permohonan maaf Aditjondro itu tidak berpengaruh dalam proses hukum yang membelitnya.
Dwi Astuti	Ya gini loh mbak, faktanya kan memang demikian, jadi ya mau bagaimana lagi. Pihak yang kami anggap netral seperti praktisi hukum pun mengeluarkan pendapat seperti itu.
Tesa	Jadi menurut mbak, bisa disimpulkan bahwa masyarakat itu tidak ada yang pro dengan pernyataan Aditjondro begitu?
Dwi Astuti	Bukan begitu juga, tetapi kan kami memilih narasumber yang pas kan, nggak asal masyarakat yang diwawancara. Kan mereka belum tentu tahu atau paham benar tentang duduk permasalahannya. Seperti praktisi hukum ini, kami melihat mereka sebagai pihak yang di luar sengketa ini, dan pemikiran mereka dilihat dari sisi hukum dan akademisi. Ya kami anggap mereka tidak memihak posisi A atau B, begitu mbak. .
Tesa	Biasanya wartawan kan memiliki idealisme sendiri, ketika mbak melakukan peliputan Aditjondro, apakah ada pesanan dari redaksi? Misalnya <i>frame</i> yang ingin dibentuk seperti ini atau itu.
Dwi Astuti	Emm nggak sih, kami wartawan menulis faktanya seperti apa dan dari redaksi kan juga ada <i>screening</i> lagi toh mbak. Jadi kami ya mengolah data menjadi sebuah tulisan, nanti redaktur akan membaca tulisan wartawan dan kiranya jika ada yang menimbulkan yang tidak pas dan menimbulkan konflik yang lebih luas, pasti akan di- <i>cut</i> .
Tesa	Berarti ada proses seleksi begitu ada sesuatu hal yang mengundang konflik ya mbak. .
Dwi Astuti	Tetapi wartawan juga harus lebih hati-hati dan tahu sih, apakah berita yang ditulisnya menimbulkan konflik, jadi <i>screening</i> -nya pun berlapis ya mbak. Dari wartawan sendiri juga, kemudian ke redaktur.
Tesa	Menurut pengamatan saya di periode Desember 2011, cukup banyak berita terkait Aditjondro yang menjadi <i>headline</i> . Nah untuk menentukan layak tidaknya suatu berita menjadi <i>headline</i> , apakah wartawan juga mendapatkan andil di rapat redaksi untuk menentukan <i>headline</i> ?
Dwi Astuti	Yang menentukan sih tetap kebijakan redaktur ya mbak. Kami cuman sebatas menuliskan berita.
Tesa	Terkait dengan profesi mbak sebagai wartawan yang bekerja di media, pastinya ada banyak kepentingan yang mempengaruhi, anggaplah itu pemodal, pengiklan dan segala macamnya. Nah, sejauh apa rutinitas itu mempengaruhi kinerja mbak sebagai wartawan?
Dwi Astuti	Ya sebagai wartawan, kami wajib menulis apapun yang terjadi di lapangan. Kan kami berdasarkan fakta toh mbak. Dan kembali lagi ke kebijakan redaksi, kalau

	memang tidak layak atau mengganggu kepentingan lain, mungkin tidak akan diterbitkan. Sejauh ini sih, saya tidak terlalu mendapatkan pengaruh langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan itu. Terkait dengan penulisan kasus Aditjondro sendiri pun saya merasa tidak ada batasan, dan tetap bisa kritis.
Tesa	Lalu apakah ada kendala dalam melakukan peliputan terkait kasus Aditjondro?
Dwi Astuti	Emm seingat saya sih tidak ada kendala yang terlalu berpengaruh ya mbak. . Soalnya beberapa narasumber pun bisa diajak kerja sama untuk melakukan proses wawancara. Memang sih di awal kasus, Aditjondro sempat menghilang dan wartawan sempat kesulitan untuk mendapatkan tanggapan dari Aditjondro. Tetapi kemudian beliau bisa dihubungi, malah datang langsung ke Kepatihan untuk meminta maaf. Dan dia sendiri malah terbuka dengan wartawan.
Tesa	Menurut pengamatan mbak sendiri, sebenarnya <i>frame</i> apa yang ingin dibentuk Kedaulatan Rakyat terkait kasus penghinaan yang dilakukan Aditjondro kepada Keraton Yogyakarta?
Dwi Astuti	Ya cenderung menyajikan fakta aja sih. Tidak maksud untuk menunjukkan kalau Aditjondro niat <i>ngece</i> istilah jawanya, ke Keraton. Menurut saya sih tidak terlalu menggiring ke opini tertentu, sebab kami sudah berusaha membuat pemberitaan yang berimbang. Dan tidak ingin memojokan siapapun. Faktanya kalau Aditjondro banyak dibenci masyarakat, ya itu sudah menjadi hak masyarakat.
Tesa	Berarti bisa dikatakan posisi KR ini netral, atau berpihak ke Keraton atau seperti apa mbak?
Dwi Astuti	Saya rasa netral kok mbak. Dan tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun, termasuk kepada Keraton sekalipun. Terkait kasus ini, kami pun berusaha selalu memuat <i>statement-statement</i> dari Aditjondro, jadi tidak hanya dari Sultan atau pihak Keraton saja.
Tesa	Tetapi mbak, saya melihat kecenderungan di periode Desember 2011 itu memojokan Aditjondro. Saya ingin menegaskan lagi mbak, hubungan KR dengan Aditjondro itu seperti apa?
Dwi Astuti	Menurut sepemahaman saya sih netral kok mbak hubungan KR dengan Aditjondro selama ini. Dan ini kembali lagi dengan idealnya media, dimana media ya harus netral.
Tesa	Pendapat mbak sendiri melihat kasus Aditjondro ini seperti apa? Mulai dari munculnya pernyataan kontroversial, protes dari masyarakat sampai bergulir di ranah hukum.
Dwi Astuti	Kalau pendapat saya sih, Aditjondro kan bukan sekali ini saja ya melakukan kehebohan. Sebelumnya dia pernah menghebohkan masyarakat dengan buku Gurita Cikeasnya. Menurut wawancara saya dengan Aditjondro, saya melihat pernyataannya memang keceplosan ya. Ya memang sih tidak layak diucapkan, apalagi di dalam forum resmi seperti seminar itu ya mbak. Kalau sebagai masyarakat yang berpendidikan, harusnya tidak seperti itu pernyataan yang dikeluarkan. Tapi kan kemudian Aditjondro sudah menyadari, dan meminta maaf. Sayangnya Sultan itu sepertinya tidak membuka pintu maaf, bahkan sepengetahuan saya sekarang ini kok belum terjadi ya pertemuan Aditjondro dengan Sultan. Padahal Aditjondro sudah bolak-balik ke Kepatihan, tetapi sepertinya tidak punya kesempatan untuk bertemu Sultan. Memang sih Sultan sudah memberikan tanggapan dan mempersilahkan George untuk menemuinya, tapi kok menurut saya

	itu cuman sebatas omongan saja. Terlebih pernyataan Sultan juga cenderung mengambang ya mbak. Menurut saya ketika sebagai orang yang bersalah, Aditjondro sudah melakukan hal yang benar untuk meminta maaf.
Tesa	Mbak sendiri kan melihat langsung adanya protes masyarakat, seperti aksi tabur bunga di kediaman Aditjondro dan di Polda DIY. Bagaimana tanggapan mbak terkait aksi dari masyarakat terkait kasus ini?
Dwi Astuti	Kalau saya sih, kadang-kadang malah agak kasian juga ya dengan posisi Aditjondro, sampai dikucilkan begitu. Terlebih dengan reaksi masyarakat, Aditjondro sendiri tidak berani pulang ke rumahnya. Ya sebenarnya sih wajar juga ya jika pada akhirnya masyarakat marah seperti itu, tetapi untungnya setelah beberapa pekan emosi masyarakat mulai reda. Biar bagaimanapun kan masyarakat Yogyakarta memiliki keterikatan yang erat ya dengan Keraton. Sehingga rasa membelanya juga tinggi.
Tesa	Saya pernah melihat di suatu artikel, KR mengutip suatu tulisan di poster yang ditujukan kepada Aditjondro, dimana berbunyi siapa sih dalang dibalik pernyataan yang menghina Keraton. Nah menurut mbak, apakah memang ada pihak lain di balik munculnya pernyataan Aditjondro?
Dwi Astuti	Menurut pengamatan saya sih, pernyataan itu bentuk spontanitas Aditjondro ya. Cuman mungkin saja ada pihak yang membonceng, namun saya tidak tahu pasti untuk menganalisis sedalam ini mbak. Tetapi saya merasa, setelah pernyataan itu keluar, malah ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi tersebut.
Tesa	Nah berdasarkan analisis saya di bulan Desember 2011, KR seperti memberikan porsi pemberitaan yang sedikit untuk Aditjondro dalam menanggapi kasus yang membelitnya. Sebenarnya apakah memang KR bersikap demikian atau seperti apa mbak?
Dwi Astuti	Ya pertama-tama kan dia sempat menghilang di awal-awal kasusnya muncul, baru setelah beberapa hari dia berani menampakan diri di Kepatihan. Terlebih dia tuh susah ditemui dan dihubungi mbak. Jadi ketika pernyataan kontroversial itu keluar, kami kesulitan menghubungi Aditjondro. Setelah Aditjondro ke Kepatihan pun, beliau kemudian menghilang. Waktu saya meminta nomor <i>handphone</i> -nya, dia <i>nggak</i> mau ngasi. Dan kami mau bertemu dimana, juga tidak tahu.

N.B: Terakhir pemberitaan ya pas kasusnya di Polda itu, ketika tidak menarik lagi ya tidak kami liput.

**Transkrip Wawancara dengan Wahyu Prianti (Wartawan Kedaulatan Rakyat -
desk Hukum dan Kriminal)**

Pewawancara: Tesa Oktiana S

Tanggal: Selasa, 18 September 2012

Pukul: 16.30 WIB

Tesa	Sebelum masuk ke topiknya, mungkin mbak Wahyu bisa menjelaskan dulu yang melatarbelakangi menjadi wartawan Kedaulatan Rakyat?
Wahyu	Yang jelas sih, dari kecil saya sudah tertarik di dunia jurnalistik begitu mbak. Dan memang ingin menjadi wartawan. Memang sih saya kuliahnya di hukum, tapi karena mendapatkan tawaran di media lain, kemudian akhirnya saya beralih ke media cetak KR. Jadi saya sudah bergabung di KR selama lima tahun lebih, ya dimulai sekitar tahun 2007 lah mbak.
Tesa	Sebagai wartawan KR, bisa dijelaskan posisi wartawan ketika melakukan rapat redaksi seperti apa? Apakah semua wartawan wajib ikut?
Wahyu	Jelas wajib mbak. Cuma ada beberapa situasi yang memungkinkan tidak bisa mengikuti rapat redaksi pun tidak menjadi masalah. Misalnya saya ada liputan mendadak, ya saya langsung liputan. Terlebih saya ini kan wartawan di <i>desk</i> hukum dan kriminal ya mbak. Jadi peristiwa yang kami liput itu tidak bisa kami rancang, seringnya tidak bisa diduga dan terjadi sewaktu-waktu begitu mbak.
Tesa	Jadi fokus penelitian saya pada pemberitaan kasus Aditjondro di periode Desember 2011, nah saya melihat wartawan yang mendominasi menulis pemberitaan tersebut berinisial Ayu dan Ast. Dan dari wawancara dengan pak Hudono sebelumnya, sudah dijelaskan siapa pemilik inisial tersebut yang salah satunya adalah mbak. Apakah mbak wahyu sendiri, sebelum meliput kasus Aditjondro, apakah sering meliput kasus sensitif terkait Keraton Yogyakarta?
Wahyu	Keraton ya? Emm. .berhubung saya itu tugasnya di <i>desk</i> hukum dan kriminal ya mbak, jadi saya kan fokus ke <i>follow up</i> kasus Aditjondro dari sisi hukum, kebanyakan saya ya <i>stand by</i> di Polda DIY pada waktu itu. Nah sebelum kasus Aditjondro ini keluar, saya belum pernah meliput berita terkait Keraton dari sisi hukum, seingat saya selama menjadi wartawan KR, baru kali ini ada laporan ke kepolisian terkait kasus dengan Keraton. Untuk kasus Aditjondro sendiri, saya itu ditugaskan untuk memantau perkembangan laporan kasus George Aditjondro dari sisi hukum.
Tesa	Terkait dengan tugas mbak sebagai wartawan, bagaimana mendapatkan berita yang mendalam selama masa peliputan? Lalu bagaimana meyakinkan narasumber untuk diwawancarai?
Wahyu	Ini langsung saya hubungkan dengan tugas peliputan saya terkait kasus Aditjondro ya mbak?! Jadi karena penugasan saya fokus di kepolisian, jadi saya cenderung meliput bagaimana perkembangan kasus Aditjondro di kepolisian mbak. Dan kebetulan pihak kepolisian yang saya wawancara itu sangat kooperatif dan saya

	sendiri tidak menemukan kesulitan untuk menggali data lebih dalam. Apalagi ini kan kasus yang disorot publik ya, karena terkait Keraton. Jadi pihak kepolisian sangat terbuka, apa yang ditanyakan ya langsung dijawab begitu mbak, seperti tanpa menutupi sesuatu. Untuk mendapatkan pernyataan Aditjondro sendiri? Emmm. . .kalau Aditjondro kan memang sulit ditemui ya mbak. Dan polisi sendiri baru bisa menghadirkan George itu di panggilan ketiga, karena beliau kan pindah-pindah. Jadi pada panggilan polisi yang ke 1 dan 2 itu George tidak memenuhi panggilan begitu.
Tesa	Dalam penulisan berita kan dikaitkan dengan 5W+1H, nah sebagai wartawan di Kedaulatan Rakyat, apalagi yang menjadi pertimbangan dalam penulisan berita?
Wahyu	Emmm. . .sesuai dengan posisi saya di <i>desk</i> hukum dan kriminal ya mbak, biasanya sesuatu yang rawan menimbulkan konflik baru itu tidak berani kami tulis. Terus terkait identitas narasumber, misalnya ada hal yang membahayakan narasumber terkait kasus yang kami angkat. Jadi ya kami harus berusaha menjaga kerahasiaan narasumber juga mbak.
Tesa	Lalu ketika menulis berita, apakah ada pesanan dari redaksi nggak sih mbak untuk membentuk suatu <i>frame</i> atau arah wacana tertentu?
Wahyu	Kadang-kadang ya mbak, tidak selalu juga. Tapi dalam kasus tertentu, ya ada juga sih arahan dari redaksi dalam meliput dan kemudian mengemasnya dalam berita, misalnya terkait isu atau peristiwa yang sedang <i>hot</i> dibicarakan. Biasanya diserahkan sepenuhnya kepada wartawan dalam menuliskan beritanya. Jadi apa yang ada di lapangan, ya langsung ditulis saja. Ini gak apa-apa ya kalau contohnya di luar kasus Aditjondro? Misalnya kasus perampokan ya mbak, kan bukan fakta terkait perampokannya saja. Tetapi kita juga harus <i>flashback</i> terkait kasus tersebut, nanti dari wartawan lain meliput dari sisi kriminolog. Jadi dalam penulisan berita kan tidak hanya berasal dari satu <i>desk</i> saja, tetapi ada kerja sama dari <i>desk</i> lain. Sehingga warna beritanya pun bervariasi dari berbagai perspektif.
Tesa	Untuk menentukan narasumber dalam setiap pemberitaan, apakah ditentukan dari rapat redaksi, misalnya perintah dari redaktur pelaksana atau menjadi otoritas wartawan sendiri?
Wahyu	Ya lagi-lagi terkait posisi saya di <i>desk</i> hukum dan kriminal ya mbak. Jadi kami tuh cenderung belum tahu apa yang kami liput keesokan harinya. Karena tergantung peristiwa apa yang terjadi, ya sudah tentu menjadi otoritas kami dalam memilih narasumber. Tetapi kami juga melaporkan kepada redaktur terkait peristiwa yang kami liput, nah biasanya baru redaktur memberikan masukan untuk narasumber yang harus diwawancarai terkait sisi apa yang harus dikembangkan.
Tesa	Dan ketika dikaitkan dengan kasus Aditjondro sendiri, berarti apakah mbak sudah ditugaskan terlebih dahulu untuk mewawancarai siapa-siapa saja atau bagaimana?
Wahyu	Kebetulan karena saya langsung fokus ke kepolisian daerah ya. Dan di kepolisian itu kan informasinya berasal dari satu pintu ya, dari divisi humasnya. Jadinya ya untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus Aditjondro, kami langsung mewawancarai kabid humas Polda DIY begitu. Untuk misalnya wawancara dengan praktisi hukum itu, biasanya redaktur menugaskan wartawan lain. Sehingga wartawan dari <i>desk</i> hukum dan kriminal bisa lebih fokus ke beberapa lokasi dimana kami harus <i>stand by</i> gitu mbak, misalnya Polres, Polsek atau Polda dan lainnya.
Tesa	Berarti untuk masalah penulisan berita terkait penentuan judul dan <i>lead</i> pun

	menjadi kehendak wartawan begitu ya mbak?
Wahyu	Iya mbak, sepenuhnya diserahkan kepada wartawan bagaimana menuliskan peristiwanya. Baru kemudian hasil tulisan kami masuk ke meja redaktur dan melewati beberapa <i>desk</i> untuk dilakukan proses <i>editing</i> begitu.
Tesa	Terkait dengan rutinitas organisasi dalam Kedaulatan Rakyat, biasanya apa sih yang mempengaruhi kinerja mbak sebagai wartawan? Apakah ada <i>pakem-pakem</i> atau aturan tertentu yang harus dipatuhi?
Wahyu	Sejauh ini sih tidak ada aturan yang terlalu mengekang ya mbak, saya merasa masih bebas-bebas saja dalam menjalankan tugas saya sebagai wartawan di KR. Selain itu, karena tugas saya dalam meliput itu cenderung berdasarkan fakta, jadi ketika ditanyakan tentang pengaruh rutinitas organisasi terhadap kekritisan saya pun tidak terlalu berpengaruh begitu mbak. Ya sejauh ini loh yah mbak, saya merasa rutinitas yang ada di KR belum mempengaruhi ideologi saya sebagai wartawan.
Tesa	Terus selama ini ketika melakukan <i>follow up</i> terkait kasus Aditjondro, menemukan kendala <i>nggak</i> mbak?
Wahyu	Kalau untuk peliputan kasus Aditjondro sih saya tidak menemukan kendala yang berarti ya. Soalnya narasumber yang saya cari untuk diwawancarai, khususnya dari sisi hukum ya, itu sangat kooperatif mbak. Jadi saya dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk kelengkapan pemberitaan.
Tesa	Untuk pemberitaan kasus Aditjondro di periode Desember 2011, menurut mbak Wahyu bagaimana <i>frame</i> yang dibentuk oleh KR?
Wahyu	Saya menilai sih KR tidak terlalu membentuk ke suatu <i>frame</i> khusus ya. Malah KR berusaha menyajikan fakta yang ada di lapangan begitu mbak. Saya rasa tidak ada unsur kepentingan tertentu dalam pengemasan beritanya. Ini menurut saya loh mbak. . hehehe. . .
Tesa	Terkait dengan <i>frame</i> tadi ya mbak berarti kalau bisa dikatakan posisi KR dalam melihat kasus Aditjondro ini seperti apa mbak? Netral, berpihak atau seperti apa? Terlebih kalau kita sedikit <i>flashback</i> ke sejarah, jelas KR memiliki hubungan dengan Keraton Yogyakarta ya mbak. . .
Wahyu	Tetap saya rasa netral ya mbak. Mungkin ini sesuai dengan tugas peliputan yang saya lakukan ya mbak. Sebagai wartawan di <i>desk</i> hukum dan kriminal, saya sendiri berusaha menyajikan berita yang sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya dalam menulis pemberitaan seputar George, kan <i>nggak</i> mungkin saya merubah pasal ya mbak. Misalnya yang dikatakan kepolisian, pasal yang menjerat George adalah pasal sekian, maka saya tulis sesuai faktanya.
Tesa	Dalam hal pengutipan pernyataan narasumber mbak? Saya melihat di beberapa artikel, ada kutipan pernyataan yang cenderung memojokan George Aditjondro. .
Wahyu	Mungkin karena ada penggabungan peliputan ya mbak. Jadi berita yang sudah saya tulis kan pasti disatukan dengan berita yang sudah ditulis wartawan lain, nah mungkin wartawan tersebut menambahkan isu tertentu atau mengambil kutipan pernyataan narasumber yang agak sensasional untuk menjadi bumbu artikel. Kalau dari saya pribadi ya mbak, bener-bener menulis berita sesuai fakta, mungkin karena bidang saya terkait hukum ya mbak. .hehehe. .
Tesa	Jadi menurut mbak, walaupun KR memiliki hubungan dengan Keraton, tetap berposisi netral dalam mengemas pemberitaan terkait kasus penghinaan yang

	dilakukan Aditjondro?
Wahyu	Saya rasa begitu mbak, netral. Soalnya ada kontrol dari publik toh mbak. Saya yakin publik juga punya sumber informasi lain dan sebelum membaca KR pasti sudah mengikuti perkembangan kasus Aditjondro ini, terlebih terkait dengan Keraton Yogyakarta.
Tesa	Nah, kenapa saya bertanya terkait posisi KR dalam menilai kasus Aditjondro, karena pada saat saya melakukan analisis teks, saya melihat KR menyosokkan Aditjondro ke arah negatif gitu mbak. Apalagi ketika Aditjondro sudah menyatakan permintaan maaf pun, di dalam artikel terkait kasus Aditjondro itu pun tetap ditambahi dengan kutipan dari pernyataan praktisi hukum, kalau permintaan maaf Aditjondro terkesan sia-sia karena tidak dapat menghilangkan hukum pidana.
Wahyu	Ya memang sih mbak, permintaan maaf dari Aditjondro tidak memberikan pengaruh yang besar dalam proses hukumnya. Cuman terkait dengan analisis mbak tadi, karena di artikel kan bukan saya saja yang menulis, ada gabungan dari teman wartawan lain, jadi saya pribadi kurang paham mengapa arah wacana terkesan negatif begitu mbak.
Tesa	Nah sekarang ke pendapat mbak sendiri sebagai wartawan, bagaimana menilai kasus Aditjondro ini, dimulai dari munculnya pernyataan kontroversial Aditjondro sampai munculnya aksi protes dari masyarakat dan sampai diperkarakan ke ranah hukum?
Wahyu	Kalau saya melihatnya dari <i>track record</i> -nya kan, George sendiri pernah dilaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus penerbitan buku Gurita Cikeas. Dan nyatanya dari kepolisian, kalau tidak salah yang menyelidiki itu Polda Metro Jaya Jakarta tidak pernah menyeret George menjadi tersangka. Jadi saya melihat kinerja Polda DIY cukup berhasil, karena bisa menyeret George dengan pasal yang ada di KUHP terkait dengan pernyataannya itu. Dan itu sudah P21, otomatis menurut kejaksaan itu bukti-bukti penyelidikan sudah terpenuhi. Berarti apa yang dikatakan George pada saat seminar, memang terbukti melanggar hukum. Ya kalau P21 sebenarnya berkasnya kan sudah lengkap dan bisa langsung disidangkan kan mbak. Cuman ternyata sudah hampir lebih dari 3 bulan ini, George Aditjondro itu sakit toh. Jadi ya bisa dikatakan kasusnya menggantung karena George-nya sakit, sehingga proses persidangan ya tertunda begitu. Jadi sebelum disidangkan polisi kan memberikan BAP ke kejaksaan kan. Tapi ternyata begitu mau diserahkan berikut dengan tersangkanya, si George ini diketahui sakit. Dan berkas P21 itu terpenuhi baru sekitaran bulan Juni mbak.
Tesa	Oh jadi kasusnya baru terbukti bulan Juni, wah berarti penanganannya cukup lama ya mbak?
Wahyu	Memang lama mbak, ada banyak pertimbangan juga sih termasuk dari keputusan jaksa dan pemenuhan berkas-berkas itu mbak, misalnya BAP gitu.
Tesa	Sedikit bergeser dari sosok George, berarti bagaimana mbak melihat kinerja kepolisian DIY, cukup cepat atau cenderung lambat?
Wahyu	Emm. lumayan cepet ya mbak, kan pasal yang dituduhkan ke George, pembuktiannya cepet. Ini sekedar info saja, Mabes saja <i>nggak</i> bisa menyeret George loh mbak terkait kasus Gurita Cikeas itu. Dan tidak berhasil menjadikan George menjadi tersangka dan tidak bisa diadili.
Tesa	Apa mungkin kinerja Polda DIY ini didorong oleh tuntutan masyarakat mbak? Kan

	kasus ini cenderung sensitif bagi masyarakat toh mbak, jadi mau <i>gak</i> mau ya kepolisian juga harus bergerak cepat
Wahyu	Emm mungkin ya mbak. Soalnya ya saya melihat sendiri bagaimana masyarakat mendesak Kapolda. Terlebih masyarakat juga datang ke kontrakkannya Aditjondro mbak.
Tesa	Sedikit bercerita pengalaman mbak, pada saat kasus ini berlangsung, mbak pernah mewawancarai Aditjondro?
Wahyu	Pernah mbak di Polda DIY, cuman beliau memang tidak banyak berkomentar. Jadi dia kan sempat ke Polda untuk pemenuhan panggilan yang ketiga kalau <i>nggak</i> salah di bulan Februari. Di panggilan 1 dan 2 itu George tidak memenuhi panggilan polisi begitu.
Tesa	Kan di lingkungan media itu ada banyak pengaruh dan tarik menarik kepentingan, misalnya dari pengiklan, pemodal, pemerintah atau masyarakat. Nah bagaimana pengaruhnya terhadap posisi mbak sebagai wartawan?
Wahyu	Ya...saya pribadi sebagai wartawan tidak terlalu merasakan ya mbak. Mungkin karena tugas saya langsung mencari dan menulis berita. Biasanya yang lebih merasakan pengaruh dari pemimpin-pemimpin redaksi mungkin ya mbak.
Tesa	Nah sebagai penulis berita terkait Aditjondro, apakah mbak merasa tulisan anda cukup mempengaruhi pembaca? Kira-kira parameternya seperti apa?
Wahyu	Jelas mbak. Seperti yang mbak bilang ini kan kasus sensitif dan disorot masyarakat, jadi saya yakin masyarakat menerima informasi yang saya tulis. Ya mungkin terkesan subyektif ya mbak jawaban saya tadi. Hehehehe. . .

Total wartawan 60 lebih termasuk contributor.